



WWF

MAJALAH

DESEMBER

2010

Tempayan

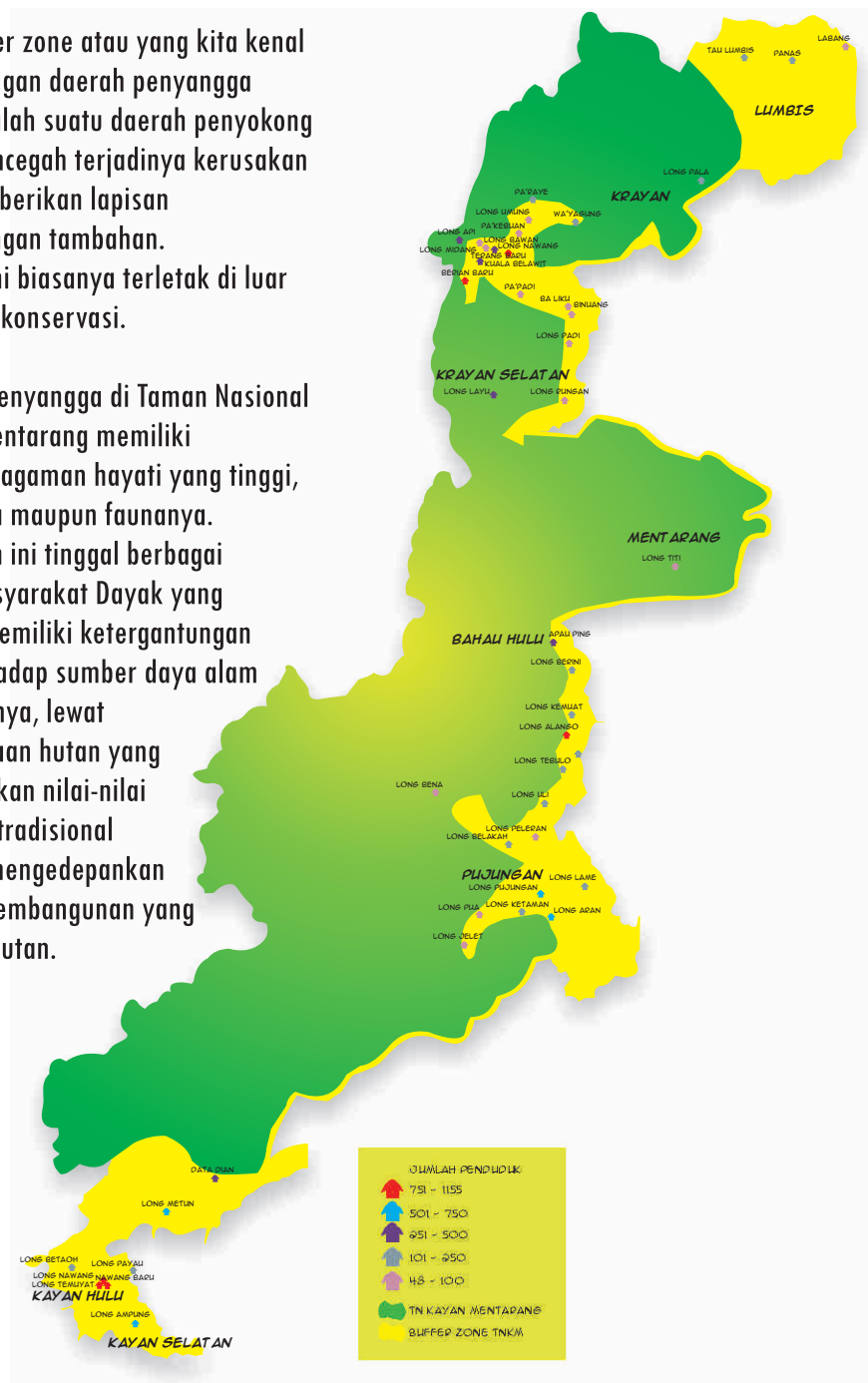
MEDIA INFORMASI TAMAN NASIONAL
KAYAN MENTARANG

Pembangunan Berkelanjutan di
Kawasan penyangga TNKM

DAERAH PENYANGGA TN KAYAN MENTARANG

Buffer zone atau yang kita kenal dengan daerah penyangga adalah suatu daerah penyangkang yang mencegah terjadinya kerusakan dan memberikan lapisan perlindungan tambahan. Daerah ini biasanya terletak di luar kawasan konservasi.

Daerah penyangga di Taman Nasional Kayan Mentarang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik flora maupun faunanya. Di daerah ini tinggal berbagai etnis masyarakat Dayak yang sangat memiliki ketergantungan erat terhadap sumber daya alam di dalamnya, lewat pengelolaan hutan yang berdasarkan nilai-nilai kearifan tradisional dengan mengedepankan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.



Dari Redaksi

redaksitempayan@gmail.com

Pembaca yang budiman, Saya selalu menikmati ketika harus mencari foto-foto terbaik tentang TNKM, untuk ditampilkan di majalah ini. Tiap *folder* saya buka, dan saya perhatikan setiap imaji secara seksama dengan masing-masing garis waktu yang berbeda. Banyak sekali foto menarik dengan cerita yang berbeda. Cerita tentang hutan dan segala potensi keanekaragaman hayatinya, flora dan fauna, masyarakat adat, atau tentang semangat pembangunan di pedesaan. Walaupun cukup menyita waktu, tapi saya sangat menikmati saat-saat itu.

Dari beberapa foto yang saya perhatikan, sangat terasa semangat kolaboratif di TNKM. Dan itu semakin saya rasakan tatkala saya berada langsung di dalamnya. Seperti ketika mengambil satu peran di lapangan dalam satu kegiatan. Semua orang bahu membahu demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di kawasan ini. Demi tercapainya kesejahteraan dalam hidup, dan menjaga hutan agar tetap lestari.

Seperti tema dalam Tempayan edisi ini, pembangunan berkelanjutan, yaitu terutama terjadi di kawasan penyangga TNKM. Akan dipaparkan beberapa tulisan terkait dengan semangat keberlanjutan di kawasan penyangga pada rubrik laporan utama. Kami sajikan juga beberapa laporan kegiatan yang sudah dilakukan, yang hasilnya penting untuk disimak. Seperti hasil laporan musyawarah besar FoMMA, seminar tumbuhan obat, pelatihan organik serta beberapa liputan terkait rangkaian acara Irau 2010.

Tempayan edisi ini juga semakin semarak dengan beberapa tulisan menarik tentang gajah Borneo, hasil kontribusi staf kami ketika bertugas di lapangan, yang dikemas dalam rubrik serba-serbi. Juga hadir profil singkat Kepala Balai TNKM yang baru, hasil wawancara langsung tim redaksi. Tak lupa kami sajikan dalam rubrik ekowisata, cerita tentang pengalaman seorang pilot MAF ketika menjelajahi trek banteng, yang merupakan rute ekowisata terbaru di TNKM, sebagai artikel penghujung di Tempayan edisi penghujung tahun ini.

Akhir kata kami dari tim redaksi mengucapkan selamat membaca, selamat tahun baru 2011. Mari kita menanam harapan untuk hari-hari yang lebih cerah di tahun yang baru.

Salam



Foto atas: WWF Indonesia/Agoes Soeyitno
Foto sampul depan: WWF Indonesia/ M. Ifansyah Lubis



Management Officer) yang telah mengakhiri masa lajangnya dengan mempersunting gadis asal Ciamis, Reni Hendriany. Akad dan resepsi telah dilaksanakan pertengahan September lalu di Parigi, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

Mewakili semua staf WWF Indonesia Program TNKM, kami mengucapkan selamat menempuh hidup baru bagi pasangan Dede dan Reni. Semoga menjadi pasangan yang *langgeng* dan diridhoi oleh-Nya. Amien.



Communications, Awareness and Advocacy Officer, dan Merzyta Septiyani yang menggantikan Desfari Christiani (Desi) untuk posisi Project Assistant.



WWF Indonesia Program TNKM kedatangan dua orang staf baru. Adalah Ery Bukhorie yang menggantikan Arman Anang untuk posisi

Ery dan Ita, demikian kedua wajah baru ini biasa disapa, telah mulai bekerja bersama tim WWF Indonesia dari akhir

Ery sebelumnya bekerja di sebuah LSM di Bogor, dan Ita adalah *fresh graduate* Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.

Selamat bergabung untuk Ery dan Ita, selamat datang di keluarga besar TNKM. Dan sampai jumpa Arman dan Desi, terima kasih atas segala sumbangsihnya selama bergabung bersama WWF Indonesia Program TNKM. Salam dan sukses selalu.

Kabar dari Rumah Panda

Rubrik ini adalah berita-berita teranyar seputaran internal kantor WWF Indonesia Proyek Taman Nasional Kayan Mentarang. Baik tentang aktifitas kantor, profil dan keseharian staf, ataupun tentang cerita-cerita singkat lainnya.



Foto ©WWF Indonesia

Tips gaya hidup hijau

Di rumah

Tutup kran air dengan rapat



Pasang pemanas bertenaga matahari di atap rumah



Pilih alat elektronik yang hemat energi listrik



Gunakan lampu hemat energi



Matikan lampu dan alat elektronik jika tidak digunakan



Panaskan air untuk minum seperlunya



Gunakan mesin cuci hanya jika cucian banyak



Panaskan mobil seperlunya



Hemat air untuk mandi



Tips gaya hidup hijau

Di kantor & sekolah

Gunakan perangkat kantor yang hemat energi



Matikan monitor komputer saat istirahat kantor



Matikan AC jika tidak diperlukan



Matikan lampu jika tidak digunakan



Hemat kertas dengan mencetak bolak-balik



Matikan perangkat kantor pada malam hari dan saat libur



Lakukan audit energi untuk menghemat energi di kantor



www.wwf.or.id

Daftar Isi

2 Delineasi Buffer Zone dan Pengembangannya di sekitar TNKM dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG)

Secara konseptual, *buffer zone* atau wilayah penyangga berfungsi untuk menyangga wilayah utama, mencegah terjadinya kerusakan dan memberikan lapisan perlindungan bagi kawasan konservasi. Dalam rangka pengelolaan kolaboratif di TNKM, delineasi *buffer zone* dianalisis melalui 2 pendekatan. Yakni pendekatan sosio-ekonomi masyarakat dan pendekatan ekologi-lanskap.

8 Buffer Zone TNKM sebagai Model Pembangunan Berkelanjutan

Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (*World Commission on Environment and Development - WCED*) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

16 Indigneous Community Conservation Areas (ICCAs)

Sejak 2008, pada kongress konservasi sedunia (WCC), disepakati bahwa kategori "kawasan konservasi" bertambah. Selain Taman Nasional dan Cagar Alam, kawasan yang dikonservasikan oleh masyarakat secara tradisional juga diakui sebagai kawasan konservasi (*protected area*). Bukan karena ada pengakuan ataupun petunjuk hukum formal, namun karena ada kebijakan adat masyarakat setempat yang melihat pentingnya SDA dikelola dan dimanfaatkan secara lestari.

20 Semangat Kolaborasi dalam Pengembangan Daerah Penyangga TNKM

Pengembangan daerah penyangga membutuhkan waktu yang tidak sedikit karena melibatkan banyak pihak yang terkadang memiliki perbedaan latar belakang dan sudut pandang untuk kepentingan yang berbeda juga. Namun itu adalah suatu tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai tujuan bersama.

24 Laporan Kegiatan; Seminar dan Musyawarah Besar Forum Musyawarah Masyarakat Adat (FoMMA)

FoMMA TNKM menyelenggarakan seminar dan musyawarah besar (mubes) akhir September 2010 lalu di Malinau. Acara yang diselenggarakan selama empat hari di Gedung Credit Union dan Hotel Wijaya, Malinau Kota ini, dihadiri oleh para Kepala Adat Besar dan perwakilan masyarakat dari sebelas wilayah adat yang ada di sekitar TNKM.

29 Laporan Kegiatan; Seminar Tumbuhan Obat

WWF Indonesia Program TNKM bekerjasama dengan Balai TNKM menyelenggarakan kegiatan seminar tumbuhan obat pada tanggal 27 Juli 2010. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan visi antar para *stakeholders* kawasan TNKM.

32 Kriteria Indikator Zonasi Sebagai Langkah Maju Pengelolaan Taman Nasional yang Memadukan Aturan Adat dalam Aturan Formal TNKM

Berdasarkan UU. No. 5 Tahun 1990 bahwa Taman Nasional dikelola dengan sistem zonasi didasarkan pada suatu kriteria yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 tahun 1998 yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional.

34 Misteri Gajah Kalimantan

Sejarah asal-usul gajah Kalimantan masih banyak menyimpan misteri hingga kini, namun demikian terdapat beberapa catatan atau manuskrip yang menyajikan cerita berbeda antara satu dengan lainnya. Cerita-cerita tersebut berpotensi sebagai penunjuk asal muasal gajah Kalimantan.

37 Profil; Ir. Helmi, Kepala Balai TNKM yang baru

Telah lebih dari 17 tahun Ir. Helmi berpengalaman di bidang kehutanan dan manajemen konservasi Taman Nasional. Lewat pengalamannya itu, mengantarkan Sarjana Kehutanan lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) ini, menjadi Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang (BTNKM) yang baru.

38 Kisah Mengejar Gajah Kalimantan

Rasa penasaranku semakin muncul, ketika orang mulai ramai membicarakan gajah Kalimantan yang terdapat di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan. Beberapa gambar asli dari foto gajah itu juga telah berhasil diambil dan sudah dipublikasikan oleh WWF Indonesia dan BKSDA Kaltim pada tahun 2006/2007. Tak terbayangkan, bagaimana rasanya jika melihat gajah liar secara langsung di alam, bagaimana reaksi yang ditimbulkan bila diantara gajah liar bertemu dengan manusia.

44 Pemilihan Duta Lingkungan dan Duta Konservasi Kabupaten Malinau 2010

Malam itu Deby Kristiani tampak tertegun. Mulutnya tersenyum ketika namanya diucapkan pembawa acara. Seperti senyum dari keenam personil Jamaican Café di atas panggung, yang tampil kompak dengan gambar panda di dada.

47 Dari Acara Pameran Pembangunan Irau 2010 Kabupaten Malinau

WWF Indonesia Proyek TNKM turut berpartisipasi dalam acara pameran pembangunan dalam rangka perayaan hari ulang tahun Kabupaten Malinau 2010, dan terpilih sebagai juara 1 untuk kategori organisasi sosial maupun masyarakat/LSM.

48 Trek banteng, Jalur Ekowisata Terbaru di TNKM

Trek ini dinamakan 'banteng' karena melintasi areal padang rumput atau grasslands yang menjadi salah satu habitat utama banteng di Borneo. Trek Banteng makan waktu sekitar 6-7 hari, tergantung kesiapan fisik wisatawan, harga dan paket lokal sudah diatur oleh masyarakat.

Penerbitan media informasi ini kerjasama antara:



Tempayan

Tempayan adalah media informasi berkala WWF Indonesia Program Taman Nasional Kayan Mentarang yang terbit setiap empat bulan sekali. Dalam setiap penerbitannya, Tempayan menyuguhkan beragam informasi seputar pengelolaan kolaboratif Taman Nasional Kayan Mentarang. Media informasi ini dibagikan secara gratis kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat yang ada di sekitar Taman Nasional Kayan Mentarang, dan semua jejaring yang terlibat dalam pengelolaan kolaboratif Taman Nasional Kayan Mentarang.

Susunan Redaksi: Penanggung Jawab: Dody Rukman Redaktur Pelaksana: Ery Bukhorie Dewan Redaksi: Cristina Eghenter, M. Irfansyah Lubis, Dede Hendra S. Koresponden: Agoes Soeyitno, Merzyta Septiyani, Ishak Baya, Andris Salo, Supardjono Tata Letak dan Rancang Grafis: Ery Bukhorie Keuangan dan Logistik: Sabar Jonny S., Komang Sukadana Kredit Foto: Dody Rukman, Cristina Eghenter, Ery Bukhorie, M. Irfansyah Lubis, Dede Hendra S., Agoes Soeyitno Dikelola oleh: Bidang Communication & Awareness WWF Indonesia Program Taman Nasional Kayan Mentarang Alamat Redaksi: Jl. Raja Pandita Rt. 07 No. 89, Tanjung Belimbing, Malinau 77554 - Kalimantan Timur Tlp: +62 553 21523 Fax: 0553 2022363



Delineasi Buffer Zone

Dan Pengembangannya di Sekitar TNKM dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG)

Dengan luasan sekitar 1,36 juta ha, TNKM yang ditunjuk sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 631/Kpts-II/1996 merupakan kawasan dilindungi terluas di Kalimantan, dan merupakan salah satu yang terluas di Asia Tenggara. Terletak di Kabupaten Malinau dan Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur dan sudah dihuni oleh masyarakat adat sejak ratusan tahun lalu. Ada ± 34.508 jiwa yang tinggal di sekitar kawasan TN Kayan Mentarang. Mereka tersebar dalam 11 wilayah adat besar yang memiliki ketergantungan erat terhadap kawasan hutan dan secara turun temurun telah memiliki kearifan tradisional dalam pengelolaan kawasan hutan yang diwujudkan dalam hutan adat, tana ulen, dll. Atas dasar demikian pengelolaan TNKM dilakukan secara kolaboratif dan menjadi model taman nasional kolaboratif pertama di Indonesia yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan kawasan taman nasional. Sebagai *supervisory body* maka dibentuk Dewan Pembina dan Pengendali Pengelolaan Kolaboratif (DP3K) TNKM berdasarkan Kepmenhut 374/Kepts-II/2007.

Disamping itu, karena kondisi sosial, budaya dan ekonomi serta kekhasan bentang alamnya, maka pada tanggal 5 Juli 2005 Pemda Malinau mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Konservasi dan telah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Malinau No. 4 tahun 2007. Sehingga pengelolaan pembangunan disesuaikan dengan kaidah-kaidah konservasi yang bertujuan menjamin kelestarian sumberdaya hutan yang ada. Namun di sisi lain pembangunan tersebut juga mampu untuk meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat dan memberikan kontribusi pendapatan kepada pemerintah kabupaten.

Pengertian *Buffer Zone*

Secara konseptual, “*buffer zone*” atau wilayah penyangga berfungsi untuk menyangga wilayah utama, mencegah terjadinya kerusakan dan memberikan lapisan perlindungan tambahan. Biasanya penyangga fisik/ekologi terletak di luar kawasan taman nasional. Menurut Undang-

“Daerah penyangga merupakan wilayah yang berada di luar kawasan suaka alam maupun kawasan pelestarian alam, baik sebagai kawasan hutan lain, tanah negara maupun tanah yang dibebani hak, yang diperlukan dan mampu menjaga keutuhan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.”

Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dinyatakan bahwa daerah penyangga merupakan wilayah yang berada di luar kawasan suaka alam maupun kawasan pelestarian alam, baik sebagai kawasan hutan lain, tanah negara maupun tanah yang dibebani hak, yang diperlukan dan mampu menjaga keutuhan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1998 tentang Kawasan

Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam, Pasal 56 (2), kriteria penyangga adalah:

1. Berbatasan langsung dengan kawasan konservasi.
2. Secara ekologis masih memiliki pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar.
3. Mampu menangkal berbagai macam gangguan.

Dalam konteks TNKM, kawasan penyangga berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau. Fungsi dari penyangga sebagai pelindung dari berbagai macam gangguan memang sudah seharusnya karena kawasan ini bukan hanya melindungi TNKM TNKM tetapi juga melindungi hulu-hulu sungai yang penting di Kalimantan Timur dan sekitarnya.

Dengan mendeklarasikan diri sebagai kabupaten konservasi maka sudah selayaknya Kabupaten Malinau mengadopsi pengelolaan *buffer zone* ini karena sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi. Selain penyangga ekologis, fungsi penyangga TNKM juga dilengkapi dengan fungsi penyangga sosial yang juga berfungsi untuk menyediakan material yang dapat dimanfaatkan bagi (kesejahteraan) masyarakat setempat.

Metode Delineasi *Buffer Zone*

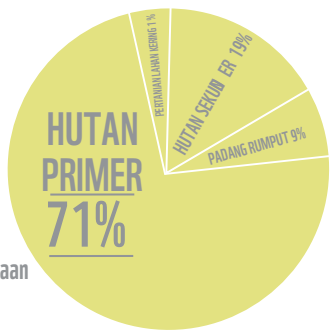
Pembuatan model delineasi *buffer zone* di TNKM dilakukan dengan mengevaluasi beberapa variabel yang penting yang berkaitan dengan kawasan penyangga. Variabel tersebut dianalisis melalui 2 pendekatan, yakni pendekatan Sosio-ekonomi masyarakat dan Ekologi-lanskap.

Foto kiri: Aktivitas pengukuran batas sementara di Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Malinau, sebagai salah satu upaya dalam penentuan delineasi *buffer zone*. (Foto: WWF Indonesia)

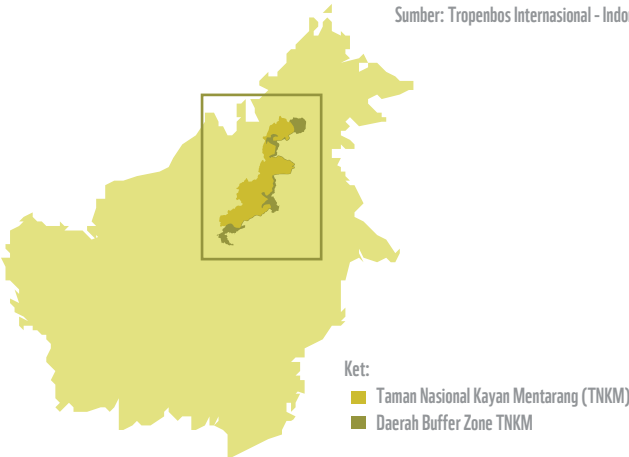
Model delineasi buffer zone TNKM



Kondisi tutupan lahan di daerah buffer zone TNKM (LULC Kaltim, TBI 2005).



0% Tanah bukaan
0% Sawah
0% Hutan mangrove sekunder
0% Pemukiman
Sumber: Tropenbos Internasional - Indonesia 2005



Luas buffer zone tiap Kecamatan

No	Kecamatan	Kabupaten	Luas (ha)
1.	Krayan	Nunukan	29.622,4
2.	Krayan Selatan	Nunukan	36.906,8
3.	Lumbis	Nunukan	98.773,9
4.	Mentarang	Malinau	10.430,5
5.	Mentarang Hulu	Malinau	3.885,8
6.	Pujungan	Malinau	93.562,8
7.	Bahau Hulu	Malinau	20.079,2
8.	Kayan Hilir	Malinau	71.218,8
9.	Kayan Hulu	Malinau	33.318,2
10.	Kayan Selatan	Malinau	12.663,1
Total			410.431,4



Pendekatan Sosio-ekonomi merupakan pendekatan yang di tinjau dari segi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar kawasan yang sangat erat hubungannya dengan kawasan tersebut. Variabel tersebut antara lain:

1. Sosial-ekonomi kawasan.
2. Sumberdaya dan tata guna lahan masyarakat adat.
3. Jarak dari pusat pemukiman.
4. Jarak dari jalan atau akses utama.

Sedangkan Pendekatan ekologi-lanskap merupakan pendekatan yang ditinjau dari segi ekologi lanskap kawasan tersebut seperti:

1. Tutupan lahan Kalimantan Timur (Kaltim).
2. Status kawasan berdasarkan RTRWP Kaltim.
3. Ketinggian dan kemiringan lereng

Seluruh variabel tersebut dianalisis dengan menggunakan SIG sehingga menghasilkan peta tematik untuk setiap variabel. Setelah itu, setiap peta tematik diberi nilai kesesuaian atau skor berdasarkan asumsi yang dipakai.

Jenis dan Sumber data

Untuk memperoleh hasil tersebut maka diperlukan beberapa data yang penting seperti :

1. Jumlah dan kepadatan penduduk, Jumlah penduduk miskin, luas lahan dan jumlah produksi pertanian pertahun, akses utama, sumber energi, jumlah lapangan udara, dan sarana pendidikan dan kesehatan. (Sumber data: Kabupaten Nunukan dalam angka 2008, Penduduk miskin Kabupaten Nunukan 2008, Kabupaten Malinau dalam angka 2008, Penduduk Miskin

- Kabupaten Malinau 2008).
2. Sumberdaya dan tata guna lahan di sekitar kawasan TNKM. (Sumber data: Pemetaan Desa Partisipatif, 1996-1998).
3. DEM (*Digital Elevation Model*) dari peta kontur yang diambil dari Peta Rupabumi Indonesia, skala 1:50.000 (Sumber data: Bakosurtanal).
4. Analisis tutupan lahan Provinsi Kaltim 2005. (Sumber data Tropenbos Indonesia, TBI)
5. Peta jaringan jalan yang telah ada dan yang masih dalam perencanaan. (Sumber data: RTRWP Kaltim 2008, Citra Landsat 2005)

Dengan menggunakan SIG, analisis spasial dilakukan dengan

Foto atas: Desa Long Alango dilihat dari udara. Desa yang terletak di zona buffer zone TNKM ini, berada di Kecamatan Bahau Hulu, Kabupaten Malinau. (Foto: WWF Indonesia)

metode tumpang susun (*overlay*), Pengkelasan (*class*), Pembobotan (*weighting*), dan pengharkatan (*scoring*). Beberapa perangkat yang digunakan seperti Laptop/PC dengan perangkat lunak Arcgis 9.2, Arcview 3.3, Erdas 8.5 dan Ms Office dan Visio.

Hasil Deliniasi Buffer zone

Dengan menggunakan batas TNKM sesuai SK Menhut no. 631 tahun 1996. maka luas *buffer zone* seluruhnya adalah 410.431,4 ha, dimana Kabupaten Malinau memiliki wilayah *buffer zone* yang lebih luas dari Kabupaten Nunukan, yakni sebesar 245.141,3 ha sedangkan Kab. Nunukan seluas 165.303,0 ha. Rincian masing-masing kecamatan bisa dilihat pada tabel di halaman sebelumnya.

Hampir seluruh ibukota kecamatan di sekitar TNKM masuk kedalam wilayah *buffer zone* kecuali ibu kota Kecamatan Mentarang dan Mentarang Hulu.

Sebagian besar daerah yang teridentifikasi *buffer zone* atau sebesar 79 % masih merupakan hutan primer terutama untuk daerah utara seperti Binuang (Kecamatan Krayan Selatan) dan Lumbis, 19 % atau sekitar 75.733,49 ha merupakan hutan sekunder, hutan sekunder ini merupakan bekas ladang yang sudah tua, berumur lebih dari 50 tahun.

S e d a n g k a n d a e r a h pemukiman, ladang baru, sawah dan semak masing-masing masih dibawah 1 % dari total luas buffer zone di sekitar TNKM. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam grafik kondisi tutupan lahan daerah *buffer zone*.

Pola Pengelolaan Buffer Zone

Berdasarkan kriteria *buffer zone* yang telah didiskusikan bersama para pihak (Pemda

Malinau dan Nunukan, PIKA, FoMMA dan Tim Ahli, dll.), maka model pengelolaan *buffer zone* terbagi menjadi lima tipologi pengelolaannya yakni :

Tipe 1 : Pemukiman/settlement

Tipe Zona penyangga ini memiliki kriteria berbatasan langsung, interaksi kuat dengan sumberdaya TNKM, potensial sebagai pelindung terhadap sumberdaya TNKM. Sebagai fungsi penyangga sosial, maka Tipe Pemukiman dapat dikelola untuk pengembangan pemukiman termasuk sarana dan pra sarana yang dibutuhkan. Selain itu yang harus dipertimbangkan adalah pengembangan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai konservasi, seperti ekowisata, budidaya hasil hutan non kayu, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan seperti mikro hidro, dsb. Di sisi lain juga harus dibangun pendidikan dengan muatan lokal tentang pentingnya konservasi di TNKM.

Tipe 2 : Lahan Produktif Milik Masyarakat

Daerah-daerah yang termasuk dalam Tipe Lahan Produktif Milik Masyarakat adalah hutan rakyat, kebun, ladang dan sawah. Fungsinya adalah sebagai penyangga sosial sekaligus penyangga fisik atau ekologi. Dengan kedua fungsi penyangga tersebut, maka tindakan pengelolaan yang bisa dilakukan antara lain pendampingan pengembangan pertanian organik, pemilihan jenis tanaman yang tidak mengundang keluarnya satwa liar dari dalam kawasan TNKM, dan sebagainya.

Tipe 3 : Kebun

Tipe Zona Penyangga Tipe Kebun mempunyai fungsi penyangga fisik atau ekologi dan sosial. Pengelolaannya diarahkan

untuk meningkatkan kesadaran dan teknis konservasi bagi pemilik dan pekerja kebun (misal tidak melakukan penangkapan dan perburuan terhadap satwaliar yang memasuki areal kebun); Sistem pengelolaan kebun kompatibel dengan prinsip konservasi (misalnya: mekanisme penghalauan satwa, tidak menggunakan bahan kimia berbahaya, tidak menanam spesies invasif); serta bekerjasama dengan manajemen TNKM dalam hal pengamanan kawasan dan keanekaragamahayati, termasuk laporan keberadaan satwaliar.

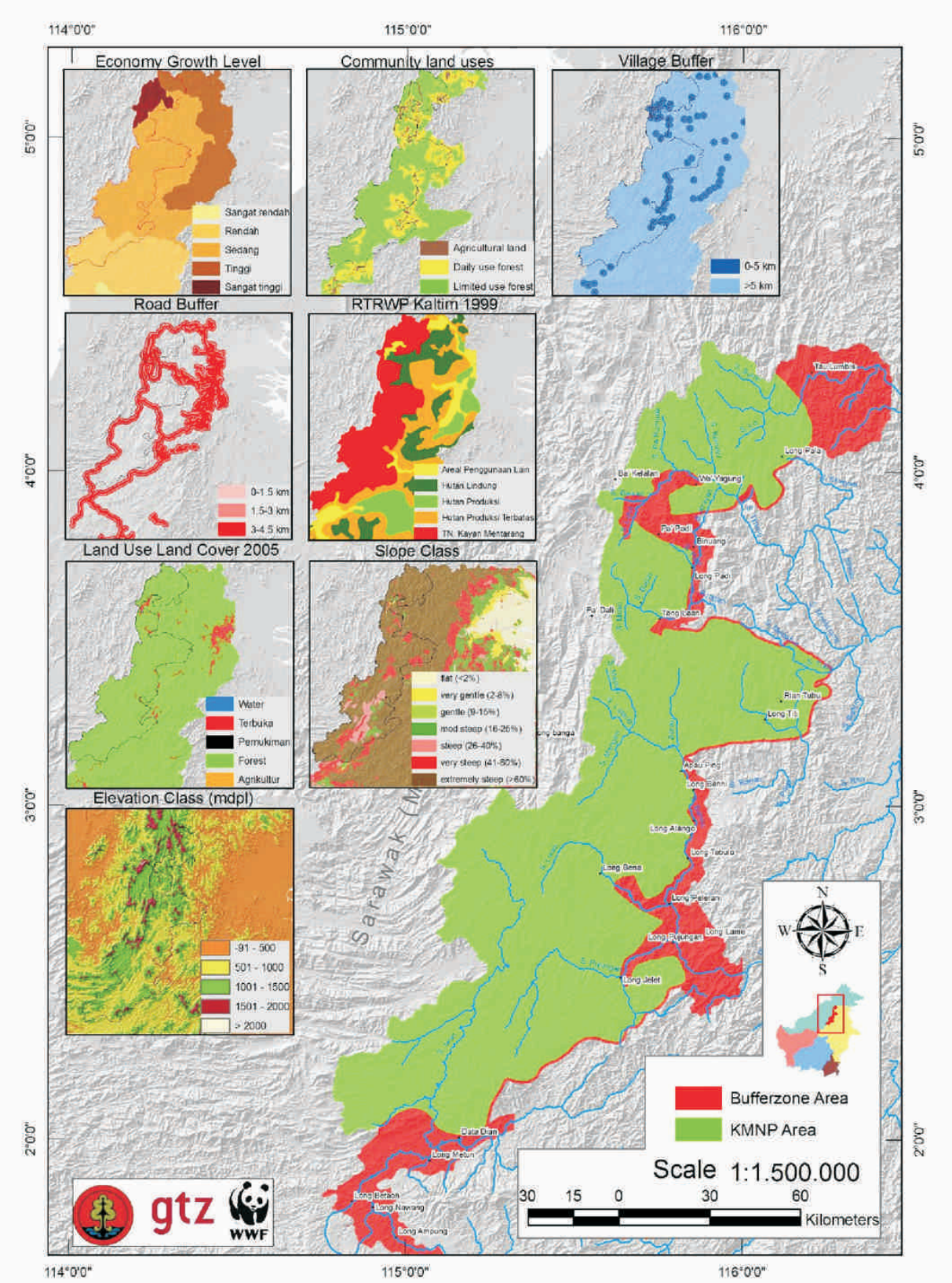
Tipe 4 : Hutan Produksi

Pengelolaan zona penyangga tipe Hutan Produksi diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan teknis konservasi bagi pemilik konsesi (misalnya tidak melakukan penangkapan dan perburuan terhadap satwaliar yang memasuki areal konsesi; tidak mengganggu habitat satwa dilindungi, dll.). Selain itu sistem pengelolaan hutan produksi berorientasi pada Pengelolaan Hutan Lestari dan sesuai dengan prinsip konservasi

Tipe 5 : Hutan Lindung

Pengelolaan Zona Penyangga Tipe Hutan Lindung diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan teknis konservasi pengelola hutan lindung dan masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam di dalamnya. Hal lain yang juga bisa dilakukan dalam Tipe Hutan Lindung adalah pengembangan teknologi ramah lingkungan, baik dalam pengelolaan hutan lindung maupun dalam rangka penyelamatan habitat satwaliar, pemanfaatan hasil hutan non-kayu. (MIL)

Peta Delineasi Buffer Zone Taman Nasional Kayan Mentarang



Buffer Zone TNKM

sebagai Model Pembangunan Berkelanjutan

Bufferzone atau yang kita kenal dengan daerah penyangga adalah suatu daerah penyokong yang mencegah terjadinya kerusakan dan memberikan lapisan perlindungan tambahan terhadap suatu kawasan yang dilindungi. Biasanya penyangga fisik/ekologi terletak di luar kawasan konservasi. Dalam kaitannya dengan *bufferzone* Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) maka daerah penyangganya berupa daerah diluar kawasan TNKM. Daerah ini dapat berupa Hutan Lindung, Hutan Produksi/Produksi Terbatas, maupun Areal Penggunaan Lain seperti pemukiman yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. Jadi pengelolaan dan pengembangan kawasan penyangga ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah serta didukung oleh pihak lain yang memiliki kepentingan di dalamnya termasuk pengelola TNKM.



Kenapa daerah penyangga perlu dilindungi?

Kabupaten Malinau dan Nunukan adalah dua kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga (Malaysia). Berada di tengah-tengah Pulau Borneo yang merupakan hulu dari sungai-sungai yang penting di pulau ini. Dengan topografi yang berbukit dan bergunung dan ditutupi hutan tropis yang lebat dan sebagian besar masih alami. Memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik flora maupun faunanya, serta tipe ekosistem yang beragam.

Berbagai etnis masyarakat dayak tinggal disekitar kedua kabupaten ini sejak ratusan tahun lalu, sehingga menghasilkan keberagaman tradisi dan budaya yang tinggi juga.

Masyarakat adat dayak tersebut memiliki ketergantungan erat terhadap kawasan hutan dan secara turun temurun telah memiliki kearifan tradisional dalam pengelolaan kawasan hutan yang diwujudkan dalam hutan adat, tana ulen, dan lain-lain. *“Hutan adalah rumah dan identitas kami,”* begitulah ungkapan masyarakat adat dayak yang berada di sekitar daerah ini.

Melindungi daerah ini berarti melindungi masyarakat etnis dayak yang berjumlah sekitar 16.000 jiwa yang ada di dalam dan sekitarnya. Melindungi tiga hulu sungai utama di Kalimantan Timur (Sungai Kayan, Sesayap dan Sembakung) yang memiliki peran penting sebagai daerah penyangga kehidupan masyarakat.

Selain itu juga mengawetkan keanekaragaman hayati dan sumberdaya yang ada di dalamnya yang dapat dijadikan dasar dalam program pembangunan berkelanjutan, serta membantu dalam menjaga keseimbangan iklim, menyerap dan mengubah karbondioksida yang merupakan polusi udara menjadi oksigen yang



kita hirup setiap detiknya, juga membantu menahan tekanan terhadap hutan di kawasan TNKM, dan membantu melestarikan hutan tropis terpenting di Asia.

Hutan merupakan “pabrik oksigen dan air” yang merupakan unsur pokok kehidupan di bumi ini, kita harus selalu ingat itu.

Bagaimana pola pembangunan yang tepat di daerah penyangga ini?

Pola pembangunan berkelanjutan adalah jawaban yang tepat. Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (*World Commission on Environment and Development - WCED*) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Kita harus ingat bahwa “hutan bukanlah warisan dari nenek moyang melainkan titipan dari anak-cucu kita.”

Ada tiga pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan. Yakni

pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Pembangunan ekonomi-sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa yang sehat jasmani dan rohani.

Pembangunan lingkungan hidup berarti menjamin bahwa sumber daya alam (SDA) yang ada saat ini masih bisa dinikmati oleh anak cucu kita mendatang. Oleh karena itu kita harus bijak dalam SDA yang ada saat ini.

“Pembangunan Berkelanjutan tidak hanya berarti berkelanjutan secara ekologis, tetapi termasuk berkelanjutan dalam dimensi Sosial dan Ekonomis”

Foto samping: Dataran tinggi Krayan, salah satu area yang berada pada zona *buffer zone* TNKM. Terlihat hamparan padi yang membentang luas mengelilingi desa. (Foto: WWF Indonesia)

Foto atas: Durian hasil panen di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan. Tampak seorang anak kecil ikut bersuka ria atas hasil bumi tersebut. (Foto: WWF Indonesia/Arman Anang)



Jejak pembangunan berkelanjutan di daerah penyangga TNKM

Daerah berhutan yang ada saat ini baik, di dalam maupun sekitar kawasan TNKM, yang berada di Kab. Malinau dan Nunukan merupakan buah hasil komitmen pemerintah pusat dan daerah beserta masyarakat adat serta pihak lain dalam menjaga SDA agar tetap lestari. Berbagai inisiatif telah dirumuskan untuk mencapai tujuan tersebut. Bahkan tiga negara yang berada di Pulau Borneo telah menuangkan Komitmennya dalam suatu rumusan yang dikenal dengan *Heart of Borneo* dengan tema ”3 negara, 1 visi konservasi”. Sementara kawasan hutan yang berada tepat di jantungnya HoB oleh pemerintah pusat diperkuat dengan ditunjuk sebagai kawasan TNKM (SK Menteri Kehutanan Nomor: 631/Kpts-II/1996) dan merupakan kawasan lindung terpenting di Asia Tropis.

Taman Nasional Kayan Mentarang ditetapkan sebagai Taman nasional kolaboratif melalui SK. Menteri Kehutanan No. 1214/Kpts-II/2002. Melalui Dewan Pembina dan Pengendali Pengelolaan Kolaboratif (DP3K) TNKM yang dapat memonitor, mengevaluasi jalannya pengelolaan kolaborasi TNKM maupun pembangunan berkelanjutan di daerah penyangga.

“Kabupaten Konservasi” itulah sebutan untuk kabupaten Malinau saat ini, pemerintah daerah telah mendeklarasikan dirinya sebagai kabupaten yang juga mempertimbangkan aspek konservasi dan lingkungan dalam program pengembangan daerahnya.

Begitu juga halnya dengan Kabupaten Nunukan yang merelakan 23% wilayahnya menjadi taman nasional dan 7% menjadi kawasan lindung. Dengan demikian kita melihat bahwa pemerintah daerah juga dengan semangat

otonomi daerah turut serta berperan dalam perlindungan dan konservasi alam.

Dengan semangat kolaboratif dan saling mendukung antar banyak pihak, banyak sudah program pembangunan berkelanjutan yang merupakan buah dari komitmen

“Energi listrik tenaga air ini sudah dikembangkan hampir di semua kecamatan yang menjadi daerah penyangga TNKM.”

pemerintah daerah, pemerintah propinsi, pemerintah pusat, masyarakat, LSM dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di daerahnya, beberapa programnya seperti:

1. Pengembangan Listrik Tenaga Air /*Mini Hydro* (PLMTH)

Energi listrik tenaga air ini sudah dikembangkan hampir disemua kecamatan yang menjadi daerah penyangga TNKM di Kabupaten Malinau. Salah satu PLMTH terbesar berada di Kecamatan Pujungan yang menghasilkan listrik 100 ribu KPA atau lebih dan diharapkan menjadi PLMTH terbesar di Kalimantan Timur.

PLMTH yang sudah beroperasi antara lain di Kecamatan Bahu Hulu, Kayan Hulu, Kayan Selatan, Sungai Boh dan Kecamatan Mentarang Hulu. Program pembangunan PLMTH ini diutamakan bagi daerah-daerah di

pedalaman yang memiliki potensi tenaga air.

Program ini banyak manfaat yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. Penerangan desa yang dikelola bersama (swakelola) dapat meningkatkan nilai-nilai gotong-royong masyarakat untuk kepentingan bersama. Selain itu dapat mendidik masyarakat untuk menjaga SDA khususnya hutan yang memiliki banyak manfaat.

Bisa dibayangkan berapa liter solar yang dihemat dengan adanya *minihydro* ini, pencemaran sungai oleh bahan bakar akan berkurang, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) masyarakat untuk penerangan dan lainnya akan berkurang, beberapa pohon akan hidup sehingga hutan dan SDA dapat lestari.

2. Pertanian Organik

Pertanian organik adalah pertanian ramah lingkungan yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Konsep organik mampu mempertahankan atau meningkatkan hasil pertanian secara berkelanjutan, karena pola pertaniannya hanya menggunakan bahan alami demi kesuburan tanah dan memperhatikan keharmonisan dan kelestarian alam. Pola pertanian organik menggunakan bahan alami seperti pupuk organik dan pengendali organisme pengganggu tanaman (OPT), seperti hama yang disebut pestisida nabati.

Dalam pertanian organik tidak diperkenankan menggunakan pupuk kimia, petisida kimia, serta bahan-bahan lain yang sifatnya mempercepat pertumbuhan tidak secara alami dan dalam memusnahkan hama tanaman.

Sebagai upaya dalam mendukung permbangunan

Foto sampling: Salah satu *mini hydro* yang sudah terinstalasi, yang terletak di Desa long Berang, Kecamatan Mentarang Hulu, Kabupaten Malinau. (Foto: WWF Indonesia/M. Irfansyah Lubis)



berkelanjutan di TNKM, WWF Indonesia Program TNKM bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Dinas Pertanian Malinau, Balai TNKM, dan Forum Musyawarah Masyarakat Adat (FoMMA) telah menyelenggarakan pelatihan pertanian organik kepada masyarakat. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis para petani di daerah penyangga TNKM dalam membuat pupuk organik (kompos) dan pestisida nabati agar dapat menjaga dan meningkatkan kuantitas serta kualitas hasil pertaniannya dengan upaya-upaya yang ramah terhadap lingkungan.

Pelatihan sudah dilakukan di Desa Long Berang, Kecamatan Mentarang Hulu, Kabupaten Malinau. Desa Long Berang merupakan salah satu desa yang berada di kawasan penyangga

TNKM. Sebagai upaya dalam menjaga semangat kolaboratif dan keberlanjutan, pasca pelatihan, melalui tenaga penyuluh pertanian di tingkat kecamatan, terus memantau perkembangan dari hasil pelatihan yang diberikan.

3. Garam Gunung di Krayan

“Garam di laut” merupakan hal yang biasa kita dengar, tapi bagaimana dengan Garam di Gunung?

Fenomena alam itu dapat kita lihat di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. Tepatnya di Desa Long Midang, hanya berjarak ± 2 km dari daerah perbatasan RI-Malaysia.

Desa Long Midang merupakan daerah penyangga TNKM di Kabupaten Nunukan. Di daerah ini, garam gunung ini telah dikonsumsi oleh masyarakat Krayan sejak dari nenek moyang mereka sampai saat ini.

Selain memiliki aroma yang khas, garam gunung memiliki kelebihan dibanding dengan garam laut yang biasa dikonsumsi. Dengan kandungan yodium yang tinggi, garam ini tidak merubah warna dan aroma masakan yang dimasak, bahkan bisa membuat masakan terasa lebih nikmat.

Sampai saat ini proses pembuatan dan pengemasan garam gunung di Long Midang masih bersifat tradisional yang dikelola secara bergilir oleh masyarakat sekitar.

Air asin (bahan dasar garam) muncul dari celah-celah batu ke permukaan tanah dialirkan melalui pancuran yang terbuat dari bambu ke tempat pemasakan. Air asin ditampung dalam drum dan dimasak sampai kering. Kemudian dicetak dengan bambu lalu diasapkan.

Garam gunung merupakan suatu potensi yang dapat



dikembangkan dan sangat butuh perhatian dari pemerintah daerah dan pihak lain termasuk investor untuk meningkatkan mutu dan kualitas. Hal ini sangat penting mengingat produk ini merupakan produk khas daerah dan jangan sampai daerah atau Negara lain mencuri dan mematenkan menjadi produk asli daerah atau negaranya.

Foto atas: Air asin, sebagai bahan baku garam gunung, yang dialirkan melalui pancuran yang terbuat dari bambu, menuju tempat pengolahann. (Foto: WWF Indonesia/Cristina Eghenter)

Foto samping: Suasana ketika pelatihan pertanian organik di Desa Long Berang, Kecamatan Mentarang Hulu, Kabupaten Malinau. (Foto: WWF Indonesia/M. Irfansyah Lubis)

Cerita Sejarah Garam Krayan

Pada jaman dahulu, seorang pemburu di daerah Krayan Hilir masuk hutan untuk memburu. Begitu masuk hutan, pemburu menemukan sasarannya yaitu seekor burung yang dinamakan dalam bahas Lun Dayeh burung “bulud.” Burung ini serupa burung merpati tetapi ukurannya dan bobotnya lebih besar.

Sebagaimana kebiasaan masyarakat Lun Dayeh, si pemburu menyumpit sasarannya menggunakan anak sumpit yang telah dibalut dengan racun sumpit yang mana bila terkena sasaran akan mati dalam tempo 3-5 menit setelah terkena sumpitan.

Si pemburu menunggu dan mengintai sasarannya dari jauh. Ternyata sasarannya masih mampu terbang dan akhirnya jatuh di daerah rawa-rawa. Setelah sekian lama mencari dalam rawa-rawa tersebut, si pemburu menemukan burung yang disumpit tadi. Setelah didapat, bulu-bulunya dicabut dan dagingnya dicuci dengan air rawa yang sama. Selesai dibersihkan, si pemburu pulang dan membawa hasil buruannya.

Sesampainya di pondok, dagingnya dibakar dan begitu matang langsung dinikmati. Ternyata rasanya berbeda dengan rasa daging burung biasa. Burung yang satu ini lebih nikmat karena ada rasa asinnya. Sambil menikmati, si pemburu berpikir dan mengingat-ingat kembali kejadian-kejadian saat berburu dan si pemburu telah mencuci daging burung dengan air rawa-rawa di mana burung itu jatuh. Tanpa pikir panjang, si pemburu kembali ke rawa-rawa dan mencicipi sedikit air rawa tersebut. Ternyata benar asal rasa asin pada daging burung itu dari air rawa, yang mana di dalam areal rawa tersebut terdapat air asin.

Sejak kejadian itu, masyarakat Krayan yang sebelumnya tidak mengenal garam menggunakan air itu untuk memasak sayur dan daging. Akhirnya mereka berpikir bagaimana caranya agar air ini bisa dibawa ke mana-mana dalam bentuk bukan air. Maka melalui proses yang panjang, mereka mengetahui bagaimana caranya mengolah air ini menjadi garam seperti yang ada sekarang.” (sumber cerita sejarah: Masyarakat Krayan Hilir dan Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabupaten Nunukan)

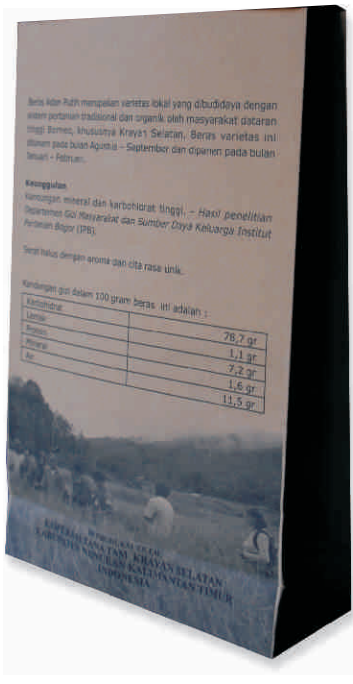
Produk lokal sebagai produk “Green & Fair” di kawasan TNKM

Produk lokal asli dan bermutu tinggi bisa mencapai nilai pasar yang lebih tinggi karena ada permintaan konsumen yang semakin hari semakin lebih tertarik dengan produk asli dan aman untuk kesehatan. Untuk daerah zona penyangga kawasan TNKM, hal ini terbukti dengan dua produk unggul sementara, yaitu beras adan dari Krayan, dan produk madu hutan dari Apau Kayan, khususnya Kayan Hilir.

Koperasi petani Tana Tam Krayan Hulu sudah berhasil mendapatkan merek dagang, “Beras Adan Tana Tam.” Beras adan ini sudah menjadi kebanggaan masyarakat Krayan dan dataran tinggi Borneo yang secara turun menurun membudidaya varietas lokal ini secara organis dengan sistim persawahan. Demikian juga dengan madu asli dari hutan di Apao Kayan, khususnya Kayan Hilir, yang terkenal aroma dan rasa asli, dan juga bermutu tinggi jika diolah berdasarkan beberapa prinsip standar pengawasan mutu (ICS).

Kedua contoh produk ini mengacu pada produk yang “Green” (=hijau) dan “Fair” (=berkeadilan) berarti produk yang berasal dari kawasan hutan, laut, dan ladang/kebun kawasan konservasi yang dikelola secara kolaboratif bersama masyarakat; produk “hijau” karena terbuat dari bahan alami yang dipanen secara berkelanjutan atau produk pertanian yang dibudidaya oleh masyarakat setempat tanpa penggunaan pestisida maupun penyubur tanah dari bahan kimia.

Produk disebut “berkeadilan” karena hasil penjualannya dapat meningkatkan kehidupan masyarakat dan upaya mereka untuk mengelola lahan dan sumber daya alam secara berkelanjutan; produk “berkeadilan” karena dijual



dengan nilai pasar yang pas dan harga yang adil bagi produsen, tanpa memberatkan bagi pihak produsen.

Sejak tahun 2004, Yayasan WWF-Indonesia meluncurkan inisiatif “Green and Fair Products” untuk bekerjasama dengan kelompok ibu dan bapak di beberapa desa di seluruh tanah air untuk membantu mempromosikan dan memasarkan produk lokal sebagai upaya penguatan konservasi dan ekonomi masyarakat lokal. WWF percaya bahwa produk ini adalah produk “terjamin” dalam arti produk tersebut memenuhi beberapa kriteria mendasar dari segi ekologi dan sosial, diambil atau dibudidaya secara berkelanjutan, diolah oleh usaha-usaha kecil milik masyarakat.

Di masa sekarang, pasar dan konsumen semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan melalui produk makanan, sayangnya produk organik ini masih jumlahnya terbatas, dan juga sebagian belum terjamin organis.

Inisiatif Produk “Green and Fair” WWF-Indonesia mencoba mengangkat produk ramah lingkungan dan adil secara ekonomi yang tidak hanya merupakan produk organis semata, tetapi juga varietas lokal dan khas dari beberapa daerah di Indonesia, termasuk beras Adan dari datarang tinggi Krayan, Nunukan, Kalimantan Timur. Tidak hanya pengolahannya bebas dari bahan kimia dan menggunakan air bersih dari gunung Krayan istimewa nya produk ini mempertahankan bibit padi asli masyarakat adat di dataran tinggi Borneo dengan nilai kesehatan dan khasiat tinggi.(MIL/CE/DSH)

Gambar atas: Kemasan beras Adan Tana Tam dan logo Green and Fair. Inisiatif program ini telah dimulai WWF Indonesia sejak tahun 2004. (Gambar: WWF Indonesia)

Foto samping: Seorang petani sedang memanen padi di Desa Ba Liku, Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan. (Foto: WWF Indonesia)



A photograph of a man standing in a river in a forest. The man is shirtless, wearing a dark cloth around his waist, and holding a long wooden staff. He is standing on a rocky bank. The river is calm, reflecting the surrounding greenery. The forest is dense with various types of trees and plants. The lighting is natural, suggesting daytime.

Indigenous Community Conservation Areas (ICCAs)

“

ICCAs adalah kawasan hutan (laut atau darat) yang dikelola oleh masyarakat adat dan masyarakat setempat secara lestari berdasarkan hukum dan peraturan adat.

“



Kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak yang bermukim pada 11 wilayah adat di dalam dan di sekitar TNKM sampai saat ini masih tergantung pada sumber daya alam atau hasil hutan yang ada dalam wilayah adat masing-masing. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yakni melalui kegiatan berladang, membuat sawah, berburu, mengumpulkan dan menjual hasil hutan.

Pemanfaatan sumber daya alam yang ada di wilayah adatnya dikelola dengan sistim tradisional, yang sejalan dengan prinsip pemanfaatan yang berimbang, dimana pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) masing-masing wilayah adat diatur dan

“Selain Taman Nasional dan Cagar Alam, kawasan yang dikonservasikan oleh masyarakat secara tradisional juga diakui sebagai kawasan konservasi.”

dikelola oleh lembaga adat melalui aturan-aturan adat.

Masyarakat Kenyah misalnya, yang sudah terkenal dengan sistem *tana ulen*, yaitu kawasan hutan (sebenarnya kawasan daerah aliran sungai/DAS anak sungai) yang secara turun temurun dikelola secara khusus untuk pemanfaatan sumber daya alam pada saat ada kebutuhan kolektif seperti keramaian atau upacara di desa dan atas izin adat.

Jika *tana ulen* dulu adalah wewenang Kepala Adat sebagai pemimpin komunitas untuk membuka *ulen* (=larangan) untuk pergi mencari hasil hutan atau ikan di kawasan itu, sekarang lembaga adat yang bertanggung jawab atas pelestarian *tana ulen* dan

peraturannya. Sistem *tana ulen* masih aktif dan bagian dari komitmen masyarakat dayak untuk mengelola hutan secara berkelanjutan.

Sejak 2008, pada kongress konservasi sedunia (WCC), disepakati bahwa katagori “kawasan konservasi” bertambah. Selain Taman Nasional dan Cagar Alam, kawasan yang dikonservasikan oleh masyarakat secara tradisional juga diakui sebagai kawasan konservasi (*protected area*). Bukan karena ada pengakuan ataupun petunjuk hukum formal, namun karena ada kebijakan adat masyarakat setempat yang melihat pentingnya SDA dikelola dan dimanfaatkan secara lestari. Kategori terbaru ini dinamakan, *Indigenous Community Conservation Areas (ICCA)*. Menurut definisi, ICCA adalah:

“Ekosistim asli atau yang terpengaruh oleh kegiatan manusia yang memiliki keunggulan dan kekayaan secara keanekaragaman hayati, sebagai penyedia jasa lingkungan dan sumber kehidupan atau memiliki nilai budaya dan tradisi yang tinggi sehingga masyarakat melindunginya secara efektif melalui hukum adat dan praktek/peraturan tradisional.”

Kalau kita memperhatikan, definisi dan fungsi *tana ulen* sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ICCA. Hasil dokumentasi beberapa kawasan *tana ulen* di wilayah Pujungan dan Hulu Bahau pada tahun ini menunjukkan beberapa kondisi dan prinsip dasar di kawsana *tana ulen*:

- Terdapat nilai keanekaragaman hayati tinggi
- Terdapat nilai ekonomi keanekaragaman hayati tinggi (kayu gaharu, kayu meranti, kapur, rotan, sang, dll)
- Dari segi sejarah, *tana ulen* dibentuk dulu hanya untuk orang bangsawan, tetapi sesuai dengan



perkembangan, ada perubahan fungsi jadi *tana ulen* untuk masyarakat desa.

- Tujuan *tana ulen* adalah, “supaya tidak terlalu bebas orang ambil hasil hutan dan untuk menjamin hutan itu supaya tetap utuh.”
- Hukum adat mengatur pelanggaran di dalam *tana ulen*, dan lembaga adat memberi sanksi kepada masyarakat yang masuk di wilayah *tana ulen* tanpa sepengetahuan pengurus adat.
- Masih ada harapan masyarakat adat untuk mempertahankan sistim dan kawasan *tana ulen* sampai masa yang akan datang, dan tingkatkan pengawasan di kawasan *tana ulen* supaya benar-benar terlindungi dari ancaman pihak luar.

Dengan adanya beberapa perkembangan terakhir ini yang menyangkut gerakan internasional dan nasional tentang perubahan iklim

dan strategi adaptasi dan “*avoided deforestation*” untuk menyelamatkan bumi, dan pentingnya peran masyarakat adat dalam membantu melestarikan sumber daya alam hutan dan air, maka kawasan hutan yang dilindungi secara adat seperti *tana ulen* menjadi penting dipertahankan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat di Malinau. (CE)

Foto hal sebelumnya: Salah satu sungai di wilayah adat Tubu. (Foto: Dominique Wirz)

Foto sampling: Pemandangan dari puncak DAS Sungai Lutung, Desa Long Uli, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau. (Foto: WWF Indonesia/Andris Salo)

Foto atas: Tempayan tua peninggalan nenek moyang di Tana Ulen Sungai Lutung, Desa Long Uli, Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau. (Foto: WWF Indonesia/Andris Salo)

“Satu-satunya taman nasional yang melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan ditetapkan sebagai taman nasional yang dikelola secara bersama (kolaboratif) di Indonesia adalah Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM). Hal yang mendasari pembentukan TNKM Kolaboratif adalah karena hutan yang ada sudah dikelola selama ratusan tahun oleh masyarakat adat Dayak yang bermukim di sekitarnya. “

SEMANGAT KOLABORASI

Dalam Pengembangan Daerah Penyangga TNKM



Sistem pengelolaan yang arif dan bijaksana ini diharapkan dapat diterapkan dalam pengelolaan kawasan TNKM sehingga hutannya tetap lestari dan masyarakatnya pun sejahtera. Hal ini juga merupakan penghargaan pemerintah kepada masyarakat adat dimana secara prinsip pemerintah mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah (wilayah adat) yang secara turun-temurun mereka huni, serta hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapat di dalam wilayah adat mereka.

Sistem pengelolaan kolaboratif melalui Dewan Pembina Pengendali Pengelolaan Kolaboratif (DP3K) dapat menjadi jembatan untuk pengembangan zona penyangga, karena dewan yang diketuai oleh Bupati Malinau dan wakil ketua Bupati Nunukan ini, dapat menyatukan kepentingan berbagai pemangku kebijakan yang ada, karena kewenangan Balai TNKM hanya ada di dalam kawasan.

Melalui pengelolaan kolaboratif TNKM, juga diterapkan dalam pengembangan kawasan di luar kawasan TNKM yang merupakan kawasan penyangga atau *buffer zone*.

Secara konseptual, *buffer zone* atau wilayah penyangga berfungsi untuk menyangga wilayah utama, mencegah terjadinya kerusakan dan memberikan lapisan perlindungan tambahan. Penyangga fisik/ekologi juga berfungsi sebagai perluasan habitat. Misalnya hutan produksi dengan tebang pilih, areal buru, dan lain-lain.

Namun demikian fungsi penyangga TNKM juga harus dilengkapi dengan fungsi penyangga sosial yang juga berfungsi untuk menyediakan material yg dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Hal ini disebabkan karena hutan di Kayan Mentarang adalah sumber penghidupan bagi masyarakat adat



yang bermukim di dalam maupun di sekitarnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu wadah untuk menyatukan para pihak yang memiliki kepentingan di daerah penyangga tersebut. Wadah tersebut sudah terbentuk sejak dibentuknya DP3K dimana di dalamnya sudah melibatkan masyarakat lokal, pemerintah lokal dan nasional, para peneliti dan akademisi, serta Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) baik lokal, nasional maupun internasional.

Pengembangan daerah penyangga ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit karena melibatkan banyak pihak yang terkadang memiliki perbedaan latar belakang dan sudut pandang untuk kepentingan yang berbeda juga.

“Keberhasilan pengembangan kawasan penyangga TNKM yang dilakukan secara kolaboratif dapat dijadikan suatu *pilot project* percontohan pengelolaan berkelanjutan di kawasan yang terdiri dari berbagai fungsi peruntukan.”

Namun itu adalah suatu tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai tujuan bersama. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan beberapa tahapan seperti berikut ini:

1. Studi daerah penyangga untuk melihat daerah yang berpotensi untuk dijadikan kawasan penyangga TNKM. Data yang digunakan diperoleh dari para *stakeholder* terkait dan diolah melalui metode SIG

(Sistem Informasi Geografis). Data tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yakni data yang

Foto sampling: Joint survey antara WWF dan BTNNM di Pujungan - Bahau Hulu. (Foto:WWF Indonesia/Agos Soeyitno)

Foto atas: Rapat DP3K yang dilakukan April bulan lalu di Jakarta. (Foto:WWF Indonesia/M. Irfansyah Lubis)

- terkait secara fisik (ketinggian, kemiringan lereng, dan lain-lain) dan data yang terkait sosial-ekonomikawasan.
2. Memetakan peran dan program para *stakeholder* yang memiliki kepentingan di daerah penyangga.
 3. Melakukan analisis kegiatan dan program yang memiliki tujuan yang sama dalam pembangunan berkelanjutan.
 4. Melakukan kegiatan secara bersama.

Secara garis besar tahapan tersebut bermaksud untuk mengumpulkan informasi kegiatan di daerah penyangga dan menganalisis serta memberikan masukan agar kegiatan tersebut sesuai prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam secara lestari.

Dengan demikian tujuan dari pengelolaan kawasan penyangga ini adalah melestarikan hutan dan mensejahterakan secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat lokal, nasional dan internasional. Oleh karena itu para *stakeholder* baik lokal, nasional maupun internasional sudah seharusnya turut serta dalam pembangunan kawasan

Foto sampling: Masyarakat dayak dari berbagai golongan ramai-ramai mendirikan sebuah tugu dalam upacara Irau 2010, sebagai salah satu cermin semangat kolaboratif. (Foto:WWF Indonesia/Ery Bukhorie)

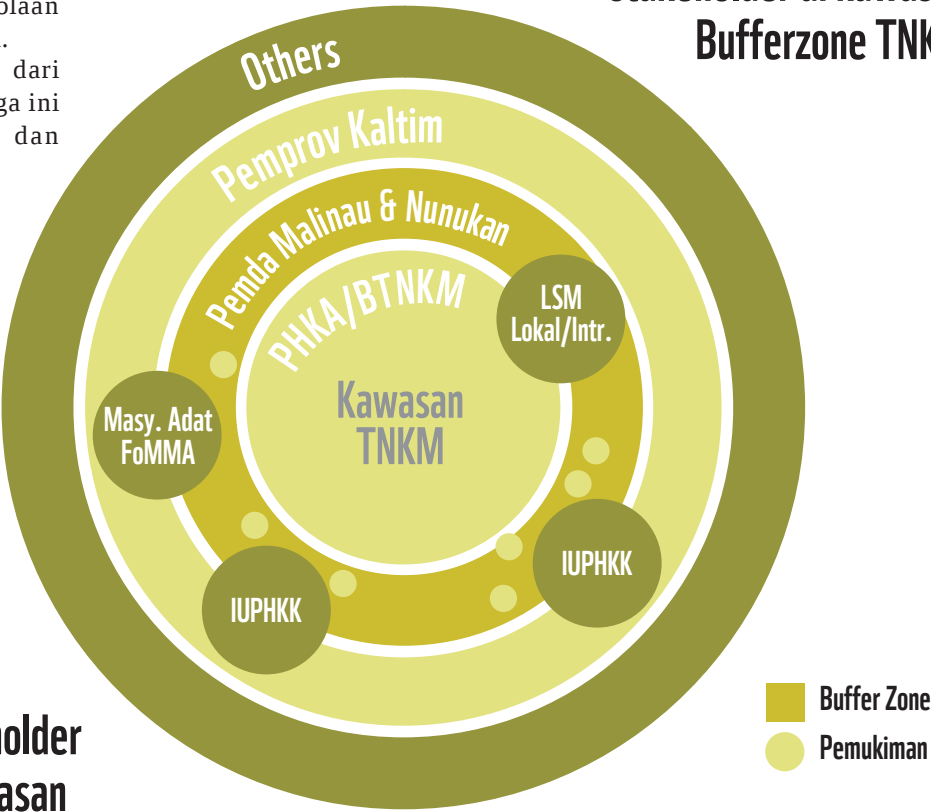
Contoh tabel matrix peran dan fungsi stakeholder dalam pengelolaan kawasan penyangga TNKM

TIPOLOGI	FUNGSI POKOK	LOKASI (lihat peta BZ)	POTENSI WILAYAH	ARAHAN UMUM PENGELOLAAN	STAKEHOLDER KUNCI	PROGRAM TERKAIT BUFFER ZONE		SUMBER PENDANAAN
						EXISTING (2001)	RENCANA/USULAN	
Pola Ruang								
Pemukiman								

penyangga ini sesuai prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel di bawah adalah tabel bantu yang digunakan untuk memetakan peran dan fungsi serta program setiap *stakeholder* yang memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kawasan *bufferzone* TNKM.

Dari tabel tersebut nantinya dapat dilihat dan disusun beberapa program yang dapat dilakukan bersama oleh beberapa pihak yang saat ini sedang disusun untuk penyusunan *master plan* zona penyangga. Dengan dukungan yang lebih besar maka akan menghasilkan *output* yang lebih besar pula sesuai tujuan bersama dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan



Peta sebaran stakeholder di kawasan Bufferzone TNKM

dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Dengan demikian keberhasilan pengembangan kawasan penyangga TNKM yang dilakukan secara kolaboratif dapat dijadikan suatu *pilot project* percontohan pengelolaan berkelanjutan dikawasan yang terdiri dari berbagai fungsi peruntukan, dan dapat mendukung program pemerintah khususnya Malinau sebagai kabupaten konservasi yang juga merupakan bagian dari kawasan *Heart of Borneo*. (MIL)





Forum Musyawarah Masyarakat Adat (FoMMA) Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) menyelenggarakan seminar dan musyawarah besar (mubes) akhir September 2010 lalu di Malinau. Acara yang diselenggarakan selama empat hari di Gedung Credit Union dan Hotel Wijaya, Malinau Kota ini, dihadiri oleh perwakilan beberapa Kepala Adat Besar dan perwakilan masyarakat dari sebelas wilayah adat yang ada di sekitar TNKM.

Acara yang seharusnya dibuka langsung oleh Bupati Kabupaten Malinau, Marthin Billa, selaku Ketua Dewan Pembina dan Pengendali Pengelolaan Kolaboratif (DP3K) TNKM, karena beliau berhalangan hadir, akhirnya dibuka oleh Ketua

FoMMA yang sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Malinau, Martin Labo. Dalam sambutan tertulis Bupati, yang dibacakan oleh Martin Labo, beliau menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap sepak terjang FoMMA selama 10 tahun ini, semenjak dirintis dan dibentuk. Bupati juga berterima kasih atas semua program yang telah dilakukan FoMMA yang dalam pelaksanaannya selaras dan saling dukung dengan pemerintah.

Dalam sambutan tertulisnya, bupati juga menyampaikan, sebagai kabupaten konservasi pemerintah Malinau punya komitmen untuk menjaga dan melestarikan lingkungan alam melalui keterlibatan pemerintah dan masyarakat. Upaya tersebut, menurut bupati, didukung pula oleh FoMMA yang punya visi sejalan.

Bupati berharap FoMMA tetap bermitra dan mendukung pemerintah khususnya dalam menjaga dan mengembangkan kedulatan masyarakat setempat. Berikut dengan lingkungan alam yang ada di sekitarnya. Pun demikian pula dengan instansi atau lembaga lain yang mempunyai peranan sama, yaitu antara lain Balai Taman Nasional Kayan Mentarang (BTNKM), WWF Indonesia, dan GTZ.

Sementara itu, Martin Labo dalam sambutannya mengatakan, FoMMA yang didirikan sejak 10 tahun lalu sebagai wadah bagi masyarakat adat dalam menyuarakan aspirasi, telah memberikan banyak sumbangsih bagi masyarakat. Melalui FoMMA, keberadaan masyarakat adat lebih diakui dan berdaya guna.

Namun demikian, khusus bagi lembaga, Martin Labo mengingatkan perlunya introspeksi ke dalam secara kritis untuk mengukur sejauh mana peran yang telah diberikan.

Sambutan juga disampaikan oleh Kepala Balai TNKM yang menyatakan bahwa visi misi Balai TNKM selaras dengan visi misi FoMMA untuk melestarikan kawasan TNKM dan masyarakat adatnya, dan mustahil TNKM berhasil tanpa adanya kerjasama dengan masyarakat adat yang ada di sekitarnya. Sambutan lain disampaikan oleh *project leader* WWF Indonesia Proyek TNKM, Dody Rukman, yang mengatakan tentang semangat pengelolaan kolaboratif TNKM, terutama yang terkait dengan pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam (SDA), salah satunya lahir dari peran serta FoMMA.

Seminar dan diskusi kelompok

Mubes diawali dengan kegiatan seminar berupa pemaparan beberapa materi tentang penguatan kapasitas FoMMA dalam pengelolaan SDA di TNKM, serta peran masyarakat adat dalam pengelolaan SDA secara terpadu dan kolaboratif. Banyak masukan-masukan informatif yang disampaikan oleh para nara sumber, dan diharapkan bisa menjadi salah satu upaya mencari persamaan visi mengenai peranan adat dan FoMMA dalam mendukung kebijakan pengelolaan SDA di wilayah adat terkait perkembangan pengelolaan kawasan TNKM.

Fasilitator seminar, Poltak Ike Wibowo, membuat alur dari hasil masukan dari narasumber, yaitu berupa data, informasi



serta motivasi. Dilanjutkan dengan diskusi kelompok, berupa analisa dan pemecahan masalah, dan pleno (sharing dan agenda prioritas) sebagai sesi terakhir.

Dua orang nara sumber, yaitu Roedy Haryo Widjono AMZ dari Nomaden Institute, menyampaikan tentang penguatan kapasitas FoMMA dalam pengelolaan sumber daya alam di TNKM, dan Matheus Pilin dari lembaga Pancur Kasih, menyampaikan tentang penguatan peran masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam dengan judul persentasi “Sebuah agenda gerakan sosial untuk mewujudkan harkat, martabat, dan kedaulatan sosial-kultural, ekonomi dan politik manusia dayak.”

Seminar dihadiri oleh 52 undangan, termasuk di dalamnya Camat Krayan dan Krayan Selatan, pengurus FoMMA, perwakilan FoMMA di wilayah adat, dan BTNKM serta WWF Indonesia.

Tanggal. 23 September 2010 memasuki tahap diskusi kelompok dan pleno. Peserta seminar dibagi ke dalam tiga kelompok dengan jumlah dan komposisi anggota seimbang berdasarkan kehadiran keterwakilan setiap wilayah adat. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh fasilitator wajib diisi oleh semua peserta, yang selanjutnya dibahas dalam kelompok untuk dijadikan kesepakatan kelompok yang akan diplenokan kepada semua peserta untuk

mendapatkan kesepakatan dan kesepahaman bersama semua peserta seminar. Adapun pertanyaan yang dijadikan bahan diskusi antara lain:

Apakah mimpi / harapan / ambisi pembentukan FoMMA, kapan program Co-management dimulai, kegiatan atau program apa saja yang dilakukan, mulai kapan bekerjasama dengan FoMMA, mengapa kerjasama dengan FoMMA dilakukan, bagaimana proses menentukan kegiatan kolaboratif, perubahan penting dan positif apa saja selama membangun kegiatan pengelolaan kolaboratif, kendala-kendala yang dihadapi dalam membangun FoMMA (internal dan eksternal), kapasitas yang biasa didayagunakan FoMMA dalam membangun co-management (internal dan eksternal), pengalaman terbaik apa saja yang dapat dijadikan pembelajaran dalam membangun co-manajemen ke depan dan rekomendasi peran FoMMA dalam co-manajemen.

Dari hasil diskusi dan pleno terdapat point-point penting untuk FoMMA kedepan yaitu memperkuat posisi dan peranan FoMMA dalam pengelolaan TNKM, peningkatan program FoMMA terutama di wilayah adat dengan sasaran kesejahteraan masyarakat adat, dan memperjuangkan alokasi dana FoMMA dari pemerintah pusat, provinsi, terlebih pemerintah daerah.

Foto sampling: Spanduk seminar dan mubes FoMMA terpampang di depan gedung Credit Union, Malinau Kota, salah satu tempat diadakannya acara. (Foto: WWF Indonesia/Dede S. Hendra)

Foto atas: Suasana diskusi kelompok dan pleno, dimana para peserta menuliskan harapan terhadap FoMMA ke depan. (Foto: WWF Indonesia/M. Irfansyah Lubis)



Laporan hari ketiga

Hari ketiga rangkaian acara seminar dan Mubes FoMMA merupakan hari yang disiapkan oleh pengurus FoMMA untuk Balai TNKM dan WWF Indonesia Proyek TNKM bersosialisasi dan berdiskusi mengenai beberapa perkembangan kegiatan dalam pengelolaan TNKM. Kesempatan ini dimanfaatkan untuk menerima masukan dan kritikan dari masyarakat wilayah adat dengan harapan beberapa kegiatan/aktivitas dapat berjalan baik sesuai tujuan dari pemikiran semua stakeholder.

Presentasi dan diskusi yang pertama yaitu mengenai program beasiswa yang sudah dan siap berjalan untuk tahun 2010. Masukan–masukan penting untuk

program beasiswa diantaranya harapan agar program ini terus berjalan setiap tahunnya, pemerataan penerima di setiap wilayah adat, proses penyaringan sampai monitoring dan pendampingan kepada penerima beasiswa agar dapat mengabdikan ilmunya di tanah kelahiran, dan agar program beasiswa tidak membatasi jumlah penerima tetapi berdasarkan kelayakan penerima beasiswa.

Acara dilanjutkan dengan sosialisasi hasil evaluasi PAM SWAKARSA yang disampaikan oleh Bernaulus Saragih selaku konsultan dari evaluasi dan perkembangan zonasi TNKM, serta oleh Kepala BTNKM, Drassopolino. Sosialisasi ini juga diharapkan agar semua stakeholder mengetahui dan mengerti perkembangan proses, permasalahan-

permasalahan dan bagaimana keberlanjutan serta berjalannya program ini ke depan. Diskusi dengan peserta juga sebagai masukan dalam penyempurnaan hasil evaluasi PAM SWAKARSA dan harapan masyarakat adat dalam 11 wilayah adat dalam zonasi TNKM.

Di sesi berikutnya, Cristina Eghenter dari WWF Indonesia, berbagi beberapa pemikiran tentang FoMMA sebagai jaminan dan memegang peran kunci dalam kolaborasi di TNKM. Dibahas juga tentang pentingnya FoMMA membangun jaringan luas dengan organisasi masyarakat adat yg lain. Beliau mengingatkan tentang FoMMA yang telah lama terlibat di jaringan kolaboratif internasional, sebagai satu-satunya perwakilan

lembaga adat dari Indonesia yang telah berhasil dalam usahanya mengelola taman nasional secara kolaboratif. Selain itu, menurutnya untuk di tingkat wilayah, FoMMA bukan sebagai “payung” tapi turut berpartisipasi secara langsung. Harus dipelajari tentang mekanisme, strategi, struktur yang baik di dalam organisasi agar bisa paham dan tahu tentang tata cara mendapatkan dukungan dari luar, dimana sebenarnya isu-isu tentang masyarakat adat sangat diperhatikan di dunia luar.

Musyawarah Besar FoMMA

FoMMA Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) secara resmi dikukuhkan pada tanggal 7 Oktober 2000. Dalam 2 tahun perjalanannya, pada tanggal 04 Februari 2002, FoMMA merupakan forum yang memiliki akta pendirian. FoMMA dibentuk dengan tujuan mengelola TNKM, dengan menghimpun dan memperjuangkan aspirasi masyarakat adat serta berdasarkan prinsip-prinsip konservasi untuk mencapai pengelolaan taman nasional yang berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat kini dan generasi mendatang.

Selama kepengurusan FoMMA periode kedua (2005-2009), keberhasilan FoMMA dalam menjalankan misinya sebagai wadah berhimpun dan memperjuangkan aspirasi masyarakat adat, sangat tergantung dari upaya dan peran aktif dari anggota FoMMA di tingkat wilayah adat. Oleh sebab itu diperlukan proses evaluasi terhadap kinerja maupun peran organisasi FoMMA selama ini sebagai wadah berhimpun bagi masyarakat adat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat adat dalam pengelolaan kolaboratif TNKM, sehingga bentuk kepengurusan, struktur organisasi dan peran kerja yang akan dibahas selama proses mubes untuk periode kepengurusan selanjutnya benar-benar berdasarkan hasil pencermatan terhadap situasi dan

kondisi wilayah adat dan masyarakat adat yang ada di dalam lingkup kerja organisasi FoMMA, serta dengan mempertimbangkan kemampuan FoMMA dalam menjalankannya.

Mubes FoMMA merupakan musyawarah besar FoMMA merupakan musyawarah rutin yang dihadiri oleh pengurus dan anggota FoMMA di setiap wilayah adat. Mubes

“
Melalui FoMMA, keberadaan masyarakat adat lebih diakui dan berdaya guna. Namun demikian, perlunya instrospeksi ke dalam secara kritis untuk mengukur sejauh mana peran yang telah diberikan.

”
dengan tujuan untuk memilih pengurus FoMMA periode selanjutnya. Dalam 10 tahun pembentukan FoMMA, Mubes dilaksanakan pada tahun 2000, 2005, dan 2010. Tahun 2010 merupakan Mubes FoMMA yang ke-3 dimana seharusnya sudah dilaksanakan pada tahun 2009. Penyelenggaraan seminar dan mubes didukung oleh WWF Indonesia Program TNKM. Rangkaian kegiatan dimulai pada tanggal 22-25 September 2010. Pelaksanaan seminar dan Mubes FoMMA dengan tujuan :

1. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurus selama periode kepengurusan 2005-2009
2. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh FoMMA baik di

- tingkat wilayah adat maupun tingkat Pengurus FoMMA terkait dengan pelaksanaan program FoMMA, merumuskan masalah dan mengupayakan pemecahannya
3. Mengevaluasi bersama kinerja dan peran organisasi FoMMA dalam pengelolaan kolaboratif TNKM
4. Menyusun rekomendasi tentang penguatan peran dan fungsi FoMMA dalam mendukung kolaboratif TNKM
5. Melaksanakan musyawarah untuk memilih Pengurus FoMMA periode 2010-2014

Setelah beberapa hari menerima masukan informatif dan berdiskusi, sehingga menghasilkan kesepakatan yang menjadi rekomendasi dalam kemajuan FoMMA ke depan, sebagai perpanjangan tangan 11 wilayah adat dalam pengelolaan kolaboratif, tiba saatnya mubes dengan tujuan utama menentukan siapa pemimpin FoMMA untuk periode selanjutnya (2010-2014).

Mubes dibuka oleh Ketua FoMMA, Marthin Labo dan selanjutnya menentukan jadwal acara kegiatan mubes. Tahapan dalam mubes yaitu pengesahan acara, pemilihan pimpinan sidang, pengesahan tata tertib, penyampaian laporan pertanggung jawaban (LPJ), pemandangan umum, tanggapan pengurus FoMMA dari pandangan umum, pimpinan sidang menyatakan pengurus FoMMA demisioner, pembentukan komisi/kelompok (komisi anggaran dasar/struktur dan komisi program), penyampaian hasil komisi dan pemilihan pengurus baru.

Dalam tata tertib pimpinan sidang haruslah berjumlah tiga orang, satu orang dari pengurus, dan dua lainnya dari peserta. Hasil kesepakatan bersama, terpilihlah pimpinan sidang yaitu Henoeh Merang (pengurus), Gat K. (peserta dari Krayan Selatan), dan Ingan (dari Bahau Hulu). Kesepakatan dalam

Foto sampling: Para peserta mubes FoMMA dengan seksama mendengarkan laporan pertanggung jawaban ketua umum FoMMA, Marthin Labo. (Foto: WWF Indonesia/Dede S. Hendra)



Bahau Hulu). Kesepakatan dalam hak suara yaitu masing-masing wilayah adat satu suara dan pengurus satu suara.

Kemudian mubes diambil alih oleh pimpinan sidang dengan melanjutkan acara LPJ Ketua FoMMA dan pemandangan umum masing-masing Kepala Adat Besar. Secara keseluruhan, Kepala Adat Besar menerima LPJ Ketua dan mengharapkan agar tetap bersedia melanjutkan kepemimpinannya dalam FoMMA.

Rasa syukur dan ucapan terima kasih disampaikan oleh Marthin Labo atas penerimaan pertanggung jawaban dan kepercayaan yang diberikan untuk duduk kembali sebagai Ketua FoMMA, kepada seluruh peserta mubes. Selanjutnya pembentukan komisi, diskusi masing-masing komisi, dan penyampaian hasil komisi.

Hasil Komisi A yang disampaikan yaitu struktur tetap memakai yang lama. Adapun masukan perubahan struktur baru, akan dibahas dalam pertemuan pengurus akan datang.

Rekomendasinya yaitu agar pengurus baru menyempurnakan redaksi perubahan-perubahan dalam AD/ART dan segera membentuk badan pelaksana.

Komisi B pembahasan program, yaitu advokasi, peningkatan ekonomi rakyat, peningkatan kuantitas dan kualitas putra-putri Masyarakat Adat dalam TNKM dan program kerjasama dengan pihak lain diluar FoMMA. Ketua FoMMA terpilih Periode 2010-2014, Marthin Labo, membentuk Tim Formatur untuk menentukan nama-nama yang duduk sebagai pengurus. Tim Formatur terdiri dari perwakilan setiap wilayah adat seperti Ketua FoMMA, Gat K, Libun, Sadung, dan Ibau Li. Berdasarkan hasil keputusan Tim Formatur, maka diputuskan kepengurusan FoMMA untuk periode 2010-2014 sebagai berikut:

Ketua Umum Pdt. Martin Labo, M. Th, Wakil Ketua I Drs. Henoch Merang, Wakil Ketua II Njau Anau, S.Pd, Wakil Ketua III Marli Kawis, Sekretaris Umum Ir. Dolvina Damus, Wakil Sekretaris I Drs. Lupis Ambo, Wakil Sekretaris II Drs. Darib Abot, ada, Ibau

Bendahara Umum Paul Belapang, Anggota Drs. Samuel ST Pada, Ibaulie, dan Anyie Apui.

Melalui rangkaian kegiatan selama empat hari, menghasilkan buah pemikiran dan kesepakatan bersama yang sudah seharusnya dijadikan landasan dan arah pengurus baru untuk menjalankan tanggung jawabnya kepada FoMMA. Juga memberi semangat baru untuk mewujudkan rasa saling mempercayai, saling mendukung, dan saling menguntungkan sesama masyarakat adat demi memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan TNKM, yaitu pada satu wadah yang bernama FoMMA. Harapan yang besar agar pengurus terpilih bisa menjalankan amanah untuk pencapaian tujuan dari FoMMA. (DSH)

Foto atas: Para peserta berfoto bersama selepas rangkaian acara seminar dan mubes selesai. (Foto: WWF Indonesia/M. Irfansyah Lubis)

Laporan Kegiatan

Seminar Tumbuhan Obat



“Menilai dan mengembangkan potensi tumbuhan obat di kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) : Pelestarian keanekaragaman hayati, perlindungan Hak Kearifan Intelektual (HKI), dan kesejahteraan masyarakat adat.”

Kawasan TNKM kaya dengan keanekaragaman hayati dan aspek kehidupan masyarakat adat, dimana berhubungan erat dengan keanekaragaman hayati. Salah satu aspek kehidupan adalah kesehatan dan pengobatan. Masyarakat adat memiliki kearifan lokal tentang tumbuhan dan obat tradisional yang masih dipertahankan dan dipraktekkan sampai sekarang. Berbagai jenis tumbuhan ditanam dan diolah menjadi obat tradisional hampir di semua desa di sekitar kawasan TNKM.

Banyak jenis tumbuhan yang dikenal dan dimanfaatkan dalam kearifan tradisional, khususnya oleh

beberapa ahli obat tradisional, dan banyak lagi tumbuhan di hutan yang memiliki potensi dan nilai farmakologi yang tinggi. Tumbuhan obat merupakan potensi kawasan konservasi, baik dari segi sumber keanekaragaman hayati dan sumber genetika asli TNKM, maupun dari segi pengetahuan dan kearifan yang dimiliki masyarakat adat tentang tumbuhan obat sehingga tumbuhan tertentu dapat dijadikan bahan baku produk pengobatan tradisional.

Kearifan masyarakat adat tentang tumbuhan obat dan pengobatan tradisional belum dilindungi secara hukum sehingga rentan terhadap kemungkinan eksploitasi oleh pihak luar, khususnya pihak swasta. duk

Tumbuhan obat dan potensi pengobatan tradisional berasal dari kawasan TNKM bisa dikembangkan sebagai satu usaha lestari dan berbasis konservasi sejauh mana Hak Kekayaan Intelektual (HKI) masyarakat adat dan ahli obat tradisional dilindungi, dan masyarakat bersama-sama pihak lain ikut memutuskan dan merancang pola pengembangan produk obat tradisional TNKM.

WWF Indonesia Program TNKM bekerjasama dengan Balai TNKM menyelenggarakan kegiatan seminar tumbuhan obat pada tanggal 27 Juli 2010. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan visi antar para *stakeholders* kawasan TNKM, maka perlu diadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang potensi tumbuhan obat di TNKM dan bagaimana potensi tersebut bisa dikembangkan menjadi satu bentuk insentif untuk pengelolaan TNKM secara lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat.

Beberapa hasil yang diharapkan nantinya yaitu mengetahui gambaran potensi tumbuhan obat dan sebarannya, mengetahui gambaran kekayaan kearifan lokal mengenai obat tradisional, adanya sosialisasi mengenai status perlindungan HKI berkaitan dengan kearifan lokal mengenai tumbuhan obat dan pengobatan tradisional, serta tersusunnya rumusan rancangan kegiatan dan peran para pihak mengenai pengembangan tanaman obat dan pemanfaatannya.

Mengingat bahwa TNKM berada di dalam 11 wilayah adat yang merupakan satu kesatuan dalam pengelolaan TNKM, dimana setiap wilayah adat memiliki kearifan masing-masing dalam pemanfaatan tumbuhan obat, maka

Foto atas & belakang: Suasana seminar tentang tanaman obat yang dilakukan di Kompleks Pemda, Malinau Kota. Peserta tampak serius mendengarkan pemaparan dari salah satu nara sumber. (Foto: WWF Indonesia/Dede S. Hendra)



“Seminar menghasilkan rumusan-rumusan yang dapat dijadikan sumber informasi dan landasan pemikiran serta tindak lanjut kegiatan bagi semua pihak terkait.”

seminar ini mengundang ahli obat atau utusan dari masing-masing wilayah adat yang mengerti tentang tumbuhan obat untuk bisa berpartisipasi. Pihak-pihak lain yang diundang untuk berpartisipasi dari Kabupaten Malinau dan Nunukan yaitu ; Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Disperindagkop, Bappeda, Dinas Kesehatan, dan Kecamatan.

Berbagi informasi dalam rangka sosialisasi dan mencari solusi mengenai tumbuhan obat, merupakan pemikiran yang melandasi perlunya beberapa nara sumber yang memiliki pengetahuan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Beberapa narasumber yang dilibatkan seperti Pak Daniel yang merupakan ahli tumbuhan obat dari Wa Yagung yang akan huan

memberikan informasi mengenai prinsip pengobatan tradisional, jenis tumbuhan dan jenis penyakit, serta aspirasi masyarakat adat terhadap tumbuhan obat, Ibu Mulyati Rahayu dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai potensi tumbuhan obat di kawasan konservasi, Bapak Anton Waspo dari Jaringan Kearifan Tradisional Indonesia (JKTI) memberikan informasi mengenai perlindungan HKI pada obat tradisional, Ibu Harlinda Kuspradini seorang peneliti dari Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman menjelaskan analisis dan kandungan kimia dari tumbuhan sebagai tumbuhan obat, dan Bapak Heri Ramadhan merupakan pencinta tumbuhan obat yang dimulai dengan mengenali jenis-jenis tumbuhan obat

pada saat mahasiswa hingga saat ini menjadi pihak swasta sebagai produsen tumbuhan obat tradisional berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai proses tumbuhan obat menjadi produk obat/kosmetika dan kondisi pasar tumbuhan obat tradisional.

Dari sektor pemerintah yang memiliki kewenangan dalam hal ini yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dalam hal ini Bapak Samuel Yusuf, Se, MSi (Kadis Disperindagkop) juga turut menjadi nara sumber untuk menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung produk tumbuhan obat dan menjelaskan prospeknya dalam pemasaran.

Seminar diawali dengan sambutan oleh Ketua Balai TNKM Bapak Drasospolino dan dibuka secara resmi oleh Asisten III Bupati Malinau Bapak Drs. H. Suriyansyah, MAP. Seminar difasilitasi oleh Mas Ade Fadli yang mengatur alur jalannya seminar. Penyampaian materi dari nara sumber dibagi kedalam dua sesi yang masing-masing diselingi oleh diskusi dan *coffe break*.

Setelah materi selesai dan istirahat siang, acara dilanjutkan dengan diskusi kelompok dimana peserta seminar dibagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok 1 mendiskusikan rumusan kegiatan dan peranan para pihak dalam pendokumentasian tumbuhan obat. Pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta kelompok 1 yang selanjutnya didiskusikan bersama yaitu ; Apa kegiatan yang anda lakukan untuk mendokumentasikan pengetahuan tumbuhan obat tradisional? Dimana kegiatan akan dilakukan ? Hal apa yang diperlukan untuk mendukung proses dokumentasi? Apa kegiatan yang diharapkan dapat dilakukan oleh pihak lain untuk mendukung pendokumentasian pengetahuan tumbuhan obat tradisional? Siapa yang diharapkan dapat melakukannya?

Kelompok 2 mengenai rumusan draft pola kerjasama antara *stakeholders* terkait (seperti masyarakat adat, BTNKM, Pemda, dan pihak swasta) membahas pertanyaan peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh pihak lain? dan siapa pihak lain tersebut? Dan kelompok 3 membahas rumusan bentuk dan upaya perlindungan HKI di kawasan TNKM dengan menjawab dan mengkaji pertanyaan diantaranya bentuk perlindungan HKI seperti apa yang diharapkan? Peran apa yang akan anda lakukan untuk memperoleh perlindungan HKI? Apa yang diharapkan dapat dilakukan oleh pihak lain? Siapa pihak lain tersebut?

Diskusi masing-masing kelompok dipimpin oleh pimpinan kelompok dan diberi arahan oleh fasilitator. Pimpinan kelompok merangkap sebagai pembicara kelompok yang akan menjelaskan hasil diskusi kepada kelompok lain. Setelah masing-masing kelompok merumuskan hasil diskusi, secara bergilir anggota kelompok mengunjungi kelompok lain untuk mengetahui dan mendiskusikan hasil guna memberi masukan dan saran terhadap rumusan kelompok yang akan menjadi kesepakatan semua peserta seminar sebagai rumusan seminar. Proses ini merupakan proses terakhir jalannya seminar. Dimana semua peserta seminar telah mengetahui dan memberi masukan serta menyepakati rumusan seminar masing-masing kelompok yang menjadi rumusan seminar. Kurang lebih 7 jam jalannya seminar yang ditutup oleh Kepala Balai TNKM menghasilkan rumusan-rumusan yang dapat dijadikan sumber informasi dan landasan pemikiran serta tindak lanjut kegiatan bagi semua pihak terkait dalam pelaksanaan program yang berhubungan dengan tumbuhan obat khususnya di kawasan TNKM. (DSH)

Tabel Hasil Diskusi Kelompok

Tabel 1. Hasil Diskusi Kelompok 1

KEGIATAN PENDOKUMENTASIAAN	PENDUKUNG PENDOKUMENTASIAAN	PIHAK YANG MELAKUKAN
Pendataan (inventarisasi) jenis-jenis TO dan produk obatnya. Spesies, ekologi, dan manfaatnya.	Masyarakat dan peneliti ahli tumbuhan obat, Kawasan hutan TNKM	Kerjasama Masyarakat adat, BTNKM, Pemda, LIPI, Universitas, Swasta (WWF)
Pembuatan herbarium tumbuhan obat (identifikasi)	Spesimen (sampel) dan foto	Kerjasama Masyarakat adat, BTNKM, Pemda, LIPI, Universitas, Swasta (WWF)
Membuat plang dan pembukuan jenis TO yang ada	Papan nama, penulis, dan penerbit	Kerjasama Masyarakat adat, BTNKM, Pemda, LIPI, Universitas, Swasta (WWF)

Tabel 1. Hasil Diskusi Kelompok 2

PIHAK TERKAIT	PERANAN
Pemda	Mengadakan pelatihan tentang pemanfaatan obat dan proses perizinan Perizinan dan sarana (peralatan) Pendanaan untuk pengembangan dan pembinaan Membantu proses pemasaran
Peneliti	Informasi mengenai manfaat Inventarisasi dan analisis (pengujian bioaktivitas) Pemahaman pembuatan ekstrak tumbuhan obat
BTNKM	Menyediakan informasi jenis Memfasilitasi antara pihak - pihak yang berkepentingan Identifikasi jenis - jenis Pembudidayaan yang teridentifikasi
Swasta	Informasi mengenai pengolahan produk, pengemasan dan label Memfasilitasi pengolahan produk
Masyarakat Adat	Menyediakan simplisia/ sampel, bahan baku
NGO	Promosi produk dan bekerjasama dalam kegiatan-kegiatan

Tabel 1. Hasil Diskusi Kelompok 1

PERLINDUNGAN HKI	PERAN DALAM PERLINDUNGAN HKI	PERANAN PARA PIHAK
Pengakuan secara utuh, Perlindungan yang jelas dari pemerintah dan lembaga adat, serta Perlindungan secara individu, badan hukum dan komunal.	Membantu komunitas HKI dalam proses untuk mendapatkan perlindungan, Meningkatkan Program sosialisasi HKI	Pemda : Memfasilitasi sampai ke pusat dan memperkuat data base pengetahuan tumbuhan obat dan kelembagaan serta dukungan dan bantuan dana Peneliti (LIPI, PT): Laporan hasil akhir penelitian dan Publikasi ilmiah Swasta: Pembinaan masyarakat adat Pemasaran JKTI/ LBH/ LA : Menjaga kearifan lokal masyarakat adat, memaksimalkan peran lembaga adat dan memberikan dukungan moral NGO Memfasilitasi, membantu/ terlibat, dan support dalam memperkuat atau mendapatkan perlindungan HKI

Pengesahan Kriteria Indikator Zonasi TNKM

Sebagai Langkah Maju Pengelolaan Taman Nasional yang Memadukan Aturan Adat dalam Aturan Formal



Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan terletak di 11 wilayah adat merupakan taman nasional yang sudah ratusan tahun dikelola oleh masyarakat, dan sampai saat ini kawasan tersebut masih relatif utuh dan terjaga dari segala tindakan yang ilegal.

Berdasarkan hasil fasilitasi WWF Indonesia melalui berbagai penelitian, kajian maupun pemetaan partisipatif mengarahkan bahwa TNKM harus dikelola secara kolaboratif dengan masyarakat sebagai

stakeholders kuncinya.

Berdasarkan UU. No. 5 Tahun 1990 bahwa Taman Nasional dikelola dengan sistem zonasi didasarkan pada suatu kriteria yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 tahun 1998 yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional.

Pedoman Zonasi Taman Nasional yang diatur melalui Peraturan Menteri Kehutanan No 56 tahun 2006 merupakan alat dalam pengelolaan Taman Nasional di Indonesia, namun aturan tersebut masih bersifat

umum dan belum memperhatikan karakteristik kewilayahan. Masih diperlukan lagi suatu petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan berdasarkan kondisi kewilayahan sehingga dapat diimplementasikan di lapangan. Zonasi di TNKM memerlukan suatu sistem yang mampu mengatur pengelolaan taman nasional yang mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat adat sesuai dengan kesejarahannya. Kriteria Indikator Zonasi disusun sebagai petunjuk teknis dalam implementasi zonasi di taman



“Kriteria Indikator Zonasi ini diharapkan akan memperkuat Pengelolaan Kolaborasi TNKM, dan dapat menjadi acuan dalam implementasinya di lapangan.”

nasional. Dalam kriteria indikator diatur mengenai deskripsi zonasi, kriteria penunjukan, indikator dan arahan pengelolaan.

Dalam penyelesaian kriteria indikator zonasi TNKM telah dilakukan beberapa tahap pertemuan, dimulai dari pertemuan DP3K yang dimulai sejak tahun 2008 dengan hasil adanya Kriteria Indikator Zonasi TNKM yang disusun oleh DP3K. FoMMA berdasarkan aspirasi masyarakat juga menyusun Kriteria Indikator Zonasi dan dibahas dalam rangka menyusun kriteria indikator zonasi DP3K pada tanggal 10 dan 11 November 2008. Pada Bulan Pebruari 2009

Kriteria Indikator Zonasi yang telah disahkan oleh Ketua DP3K diserahkan kepada Departemen Kehutanan.

Untuk melengkapi kembali Kriteria Indikator Zonasi FoMMA melakukan 2 pertemuan untuk membahas Kriteria Indikator Zonasi Versi FoMMA kegiatan ini difasilitasi oleh GTZ – WWF Indonesia pada Bulan Agustus dan September 2009.

Pada Bulan September 2009 Ketua FoMMA mengirim Draft Kriteria Indikator Zonasi kepada DP3K dan Balai TNKM, setelah dilakukan konsultasi Publik di Bahau Hulu, Pujungan dan Apokayan.

Pada tanggal 27 Desember

2009 dilakukan Rapat pendahuluan untuk membahas dan menyusun Kriteria Indikator Zonasi yang nantinya akan disahkan oleh Direktur Jenderal PHKA. Direktur konservasi kawasan membentuk tim kecil untuk menyusun Kriteria Indikator Zonasi

Pada Bulan Januari 2010 dan pada tanggal 13 Pebruari 2010 telah dilakukan Pembahasan Kriteria Indikator Zonasi di Bogor yang dihadiri oleh seluruh tim kecil yang menghasilkan draft Kriteria indikator zonasi

Pada tanggal 7 April 2010 Kriteria Indikator Zonasi telah dibahas dan disosialisasikan kepada seluruh anggota DP3K, dalam rapat DP3K di Jakarta, dan pada tanggal 24 April 2010 Kriteria Indikator Zonasi disosialisasikan dalam pertemuan FoMMA di Malinau, dan pada Bulan Mei – Juli 2010, Kriteria indikator zonasi telah disosialisasikan oleh Ketua / Wakil FoMMA di 9 Wilayah Adat TNKM.

Dan akhirnya Kriteria Indikator Zonasi ini akhirnya disahkan oleh Direktur Konservasi Kawasan pada Bulan Juli 2010, Kriteria Indikator Zonasi ini diharapkan akan memperkuat Pengelolaan Kolaborasi Taman Nasional Kayan Mentarang, dan dapat menjadi acuan dalam implementasinya di lapangan. (DR)

Foto atas: Rapat DP3K yang telah dilakukan bulan April lalu di Jakarta, yang salah satu agenda rapat membahas tentang kriteria indikator zonasi. (Foto: WWF Indonesia/M. Irfansyah Lubis)

Foto samping: Desa Binuang, Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan. Desa ini terletak di daerah penyangga TNKM. (Foto: WWF Indonesia)

Misteri Gajah Kalimantan

Dahulu kebanyakan orang menganggap bahwa kehidupan gajah secara alami hanya dapat ditemukan di kepulauan Sumatera dan Jawa, walaupun kehidupan gajah di pulau Jawa saat ini sudah dinyatakan punah. Kini anggapan itu sudah mulai berbalik arah seiring adanya temuan dari hasil penelitian secara ilmiah yang sudah di publikasikan. Pertanyaanya adalah, dari mana asal-usul gajah tersebut dan kenapa baru dapat ditemukan sekarang?



Teks: Agoes Soeyitno
Foto: Stephan Wullfraat

Sejarah asal-usul gajah Kalimantan masih banyak menyimpan misteri hingga kini, namun demikian terdapat beberapa catatan atau manuskrip yang menyajikan cerita berbeda antara satu dengan lainnya. Cerita-cerita tersebut berpotensi sebagai penunjuk asal muasal gajah Kalimantan.

Ditinjau dari distribusi populasi gajah yang sangat terbatas di pulau ini, diperkirakan gajah ini bukan asli Borneo, melainkan gajah jinak dari luar yang kemudian ditaruh di pulau Borneo (Andau, 1985). Catatan sejarah menunjukkan, pada pertengahan abad 17 (tahun 1750), sebuah perusahaan Inggris di India Timur memberikan hadiah berupa gajah liar kepada Sultan Sulu dan kemudian dilepaskan di pantai timur Sabah dan kemudian berkembang biak hingga sekarang ini.

Keberadaan gajah di Kalimantan Timur, Indonesia, juga telah tercatat sejak tahun 1930-an. Catatan ini dibubuhkan dalam laporan bekas Perkumpulan Hindia Belanda Timur untuk konservasi alam. Laporan tersebut menyatakan bahwa gajah ditemukan di daerah paling utara Boeloengan hingga ke Sungai Seboekoe. Binatang ini tidak diburu, penduduk takut terhadap gajah. Jika gajah muncul di ladang, mereka akan segera pindah karena mereka tidak memiliki senjata untuk mengusir gajah-gajah itu (Westerman, 1939).

Catatan lainnya mengungkapkan, pada akhir pertengahan tahun 1960-an, sejumlah gajah dari Thailand didatangkan di pantai timur Sabah untuk digunakan sebagai pengangkut kayu balak oleh perusahaan dan industri perkebunan (Corvanich, 1995). Pada tahun yang hampir bersamaan (sekitar 1960-

an), saat terjadinya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia, barak tentara Indonesia di Simanggaris diserang oleh gajah liar hingga porak-poranda. Menurut kesaksian seorang veteran tentara, bahwa pada masa itu sekawanan gajah masih kerap di temui di Sungai Apan dan Agison,



“
Tes DNA yang dilakukan oleh WWF Malaysia dan Columbia University dengan mengambil DNA gajah Sabah menunjukkan kemungkinan bahwa gajah Borneo secara genetika berbeda dari subspecies gajah yang ada di Sumatra atau daratan Asia
”

bahkan beberapa kali ia juga menemui kawanan gajah tersebut menyeberang Sungai Agison.

Berbagai catatan di atas menunjukkan bahwa identitas dan asal-usul gajah Kalimantan masih menjadi perdebatan. Para ilmuwan berhasil memecahkan sebagian misteri itu pada tahun 2003, ketika tes DNA yang dilakukan oleh WWF Malaysia dan Columbia University mengambil DNA gajah Sabah menunjukkan kemungkinan bahwa gajah Borneo secara genetika berbeda dari subspecies gajah yang ada di Sumatra atau daratan Asia lainnya. Berdasarkan teori baru ini, baik Borneo maupun Jawa, adalah daerah asal yang paling memungkinkan bagi gajah Borneo.

Laporan terbaru berjudul “Origins of the Elephants *Elephas Maximus* L of Borneo,” yang diterbitkan dalam “Sarawak Museum Journal” bulan ini menunjukkan bahwa tidak ada bukti arkeologis mengenai keberadaan gajah dalam jangka panjang di Borneo, sehingga memperkuat kemungkinan asal-usul satwa besar ini yang berasal dari Jawa. Apabila gajah *pygmy* Borneo memang berasal dari Jawa, yang berjarak lebih dari 1.200 km, bisa dikatakan peristiwa perpindahan satwa ini merupakan translokasi gajah pertama dalam sejarah yang dapat bertahan hingga ke zaman modern seperti sekarang.

Temuan tersebut memberikan catatan dan data penting bagi para ilmuwan sekaligus sebagai hasil eksperimen yang telah berlangsung berabad-abad lamanya. Hanya dengan seekor gajah betina subur dan seekor gajah jantan subur, yang dibiarkan tak terganggu di habitat yang cukup baik, secara teori dapat menghasilkan sebuah populasi gajah sebanyak 2.000 ekor selama kurang dari 300 tahun kata Junaidi Payne dari WWF, yang juga penulis utama laporan tersebut. kemungkinan hal itulah yang terjadi di Borneo.



Penyebaran gajah di Borneo sebagian besar terdapat di Negara bagian Sabah, Malaysia. Diperkirakan jumlahnya mencapai 500 s/d 2.000 individu (Andau and Payne, 1990). Sebagian kecil lainnya terdapat di wilayah administrasi Indonesia atau di provinsi Kalimantan Timur, jumlahnya mencapai sekitar 20 s/d 80 ekor (Wulffraat, Stephan, 2007).

Diperkirakan juga keberadaan gajah-gajah tersebut tidak sepenuh waktu mereka tinggal di suatu administrasi wilayah negara, melainkan mereka selalu bergerak melintas batas negara, namun masih belum ada penelitian yang dilaksanakan secara khusus untuk mengetahui fenomena ini. Pada masa awal penelitian gajah di Kalimantan tahun 2000-an yang

dilakukan oleh WWF Indonesia (momberg et al, 1998) (Anon, 2000) dan (WWF, 2001) meski belum berhasil menemui keberadaan gajah, namun keberadaan mereka dibuktikan dari jejak dan kotoran sekitar sungai Agison, sungai Apan dan di dekat perbukitan Mayo. Kawasan inilah kemudian juga disurvei oleh DR. Ajay Desai dan tim WWF Indonesia, dimana kawasan ini diduga sebagai habitat inti gajah Kalimantan yaitu kawasan yang sering didatangi oleh kelompok-kelompok gajah dan kawasan tempat tinggal alamiah bersejarahnya (Wulffraat, Stephan, 2007).

Habitat terbesar kelompok gajah dapat ditemui di daerah aliran Sungai Agison dan Sungai Sibuda di bagian barat dan sungai Apan dan sungai Tampilon di bagian timur. Kelompok-

kelompok gajah kerap ditemui di bagian hulu Sungai Agison dibandingkan dibagian tengah atau hilirnya. Hulu sungai Agison berada di Sabah dan bagian lembah sungai ini diduga menjadi bagian penting bagi pergerakan gajah dari Sabah ke Sebuku atau sebaliknya. Namun demikian pergerakan lintas batas gajah dari Sabah ke Sebuku masih belum bisa dibuktikan secara ilmiah karena beberapa ekor gajah yang berada di Sabah telah terpasang alat collar satellite (alat deteksi dengan GPS) belum pernah melintasi ke wilayah Sebuku.

Habitat penting lainnya adalah di lembah sungai Sibuda, percabangan atau anak sungai Agison. Kawasan ini mempunyai arti penting bagi gajah karena terdapat mata air asin yang cukup besar yang kerap dikunjungi oleh kawanan gajah. Kawasan di sebelah selatan Sabah ini juga merupakan salah satu koridor penting bagi pergerakan gajah ke wilayah Indonesia. Pada masa-masa tersebut, masih belum teridentifikasi adanya gajah-gajah soliter (terutama gajah-gajah jantan). Baru pada sekitar tahun 2005 gajah soliter kerap dijumpai oleh masyarakat di sekitar kebun dan permukiman masyarakat. Pada survei tahun 2006 yang dilakukan oleh WWF Indonesia berhasil mengidentifikasi areal pengembaraan yang kerap didatangi oleh gajah soliter.

Keterangan foto: Beberapa foto Gajah Kalimantan (*Elephas maximus borneensis*) yang berhasil di dokumentasikan di habitat aslinya di Sebuku, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur. Dokumentasi diambil pada tanggal 6 Maret 2007.

Profil

Ir. Helmi, Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang yang baru

Telah lebih dari 17 tahun Ir. Helmi berpengalaman di bidang kehutanan dan manajemen konservasi Taman Nasional. Lewat pengalamannya itu, mengantarkan Sarjana Kehutanan lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) ini, menjadi Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang (BTNKM) yang baru.

Sebelumnya, beliau juga pernah memimpin Taman Nasional Alas Purwo Jawa Timur (1995 – 1998) dan Taman Nasional Takabonerate Sulawesi Selatan (2006 – 2010), selain itu beliau juga perna bekerja di Taman Nasional Baluran Jawa Timur dan Taman Nasional Lore Lindu Sulawesi Tengah.

Ketika ditemui di sela-sela kegiatannya di Kantor BTNKM, laki-laki kelahiran Palembang 48 tahun yang lalu ini, menuturkan bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh BTNKM, yaitu penguatan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) dan keanekaragaman budaya (*culturediversity*), tetap akan menjadi program kerjanya. Terkait program kerja tersebut, beliau akan memperkuat apa yang telah dibuat oleh masa kepemimpinan sebelumnya, karena menurutnya keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya sudah merupakan fondasi dari pembangunan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM).

“Dari situlah saya akan memperkuat lagi peran organisasi kelembagaan, seperti FoMMA dan DP3K, dalam wujud kongkritnya sehingga nantinya dapat saya pertanggungjawabkan,” ucapnya. Ir. Helmi menambahkan, bahwa beliau akan lebih memperhatikan

lagi asas pelestarian manfaat bagi masyarakat, baik yang tinggal di dalam maupun sekitar kawasan TNKM.

Menurut bapak yang sudah dikaruniai dua orang anak ini, TNKM termasuk bagian dari *Heart of Borneo (HoB)*, dan pada saat berbicara HoB inilah bagaimana caranya bahwa TNKM dapat berguna bagi keberadaan masyarakat adat budaya bangsa Indonesia sendiri, maupun adat budaya bangsa negara tetangga. “Kemudian saya juga akan memperkuat adat istiadat tradisi daerah melalui jaringan hubungan keanekaragaman hayati untuk kemudian dieksplor melalui pengelolaan partisipatif,” imbuh Ir. Helmi.

Ir. Hemi mengatakan, sebagai kepala dari Taman Nasional yang berbasis manajemen kolaboratif, dia akan mengembangkan sumberdaya yang sudah terbangun. “Saya harus meningkatkan sumberdaya dari TNKM untuk memahami apa dan bagaimana manajemen kolaborasi itu. Taman Nasional berbasis kolaborasi itu pada prinsipnya adalah tarik menarik kepentingan yang harus saya akomodasi melalui jalan-jalan konservasi (*biodiversity dan culturediversity*),” ujarnya.

Di waktu luangnya, Ir. Helmi mempunyai hobi menyanyi, menulis dan travelling. Beliau mempunyai motto hidup, menjadikan buku dan kehidupan alam sebagai sumber bacaan.

Visi Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM):

"Melestarikan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya di TNKM untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan sebagai ajang pendidikan, penelitian, pariwisata, serta peningkatan ekonomi secara berkelanjutan"

Misi Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM):

1. Menjamin kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem TNKM.
2. Menjamin agar pemanfaatan biota (flora dan fauna) beserta habitatnya oleh masyarakat berlangsung secara berkelanjutan.
3. Membina, memelihara, dan mempertahankan model pengelolaan kolaboratif bersama pemerintah daerah, masyarakat, mitra dan pihak-pihak terkait lainnya atas dasar saling berbagi peran, berbagi tanggung jawab dan berbagi manfaat.
4. Mengoptimalkan kesempatan pendidikan, penelitian, dan pariwisata yang sesuai dengan kaedah-kaedah konservasi.
5. Menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam berbasis kearifan budaya lokal senantiasa dapat terjaga dan dilestarikan.(MZS)



Kisah Mengejar Gajah Kalimantan



“Rasa penasaranku semakin muncul, ketika orang mulai ramai membicarakan gajah Kalimantan yang terdapat di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan. Beberapa gambar asli dari foto gajah itu juga telah berhasil diambil dan sudah dipublikasikan oleh WWF Indonesia dan BKSDA Kaltim pada tahun 2006/2007. Tak terbayangkan, bagaimana rasanya jika melihat gajah liar secara langsung di alam, bagaimana reaksi yang ditimbulkan bila diantara gajah liar bertemu dengan manusia.”

Teks: Agoes Soeyitno
Foto: Stephan Wullfraat

Januari 2010 merupakan awal kisah melakukan pengejaran gajah Kalimantan di kecamatan Sebuku. Pengejaran yang dimaksud hanyalah sebuah kegiatan untuk melihat secara langsung dan mengamati perilaku dari gajah tersebut. Ini adalah pengalaman pertama, pengamatan sebelumnya yang pernah dilakukan di hutan alam untuk mamalia besar Kalimantan adalah; Rusa Sambar (*Cervus unicolor*), Babi Hutan (*Sus barbatus*), Orang Utan (*Pongo pygmaeus*), Banteng (*Bos javanicus*) dan lain sebagainya.

Gajah adalah binatang yang memiliki ukuran terbesar di dunia yang masih bisa bertahan hidup hingga saat ini. Gajah yang ada di Indonesia merupakan kelompok gajah daratan Asia, yang dulunya dijumpai di Sumatera, sekarang juga di jumpai di Kalimantan. Dari hasil penelitian WWF Indonesia dikabarkan di Kecamatan Sebuku masih terdapat populasi gajah *group* berkisar 20-80 ekor dan untuk gajah soliter berkisar 5-20 ekor (Stephan Wullfraat, 2007).

Sebuku letaknya memang jauh sekali, berada pada bagian utara pulau Kalimantan Timur dan secara administratif letaknya sudah berdekatan dengan wilayah perbatasan Sabah, Malaysia. Perjalanan ke Sebuku memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga perlu sekali untuk menyiapkan segala sesuatunya.

Bila kita berangkat dari kota Balikpapan perjalanan dapat dilakukan dengan menaiki pesawat jenis *boeing* dan harus menuju bandara Tarakan terlebih dahulu dengan waktu tempuh selama ± 50 menit. Setelah itu perjalanan dapat dilanjutkan kembali dari bandara Tarakan untuk menuju Kabupaten Malinau dengan menggunakan pesawat yang berbeda, yaitu pesawat

berbadan kecil (Susi Air) yang jumlah penumpangnya maksimal hanya 12 orang, perjalanan dengan menggunakan pesawat ini dapat ditempuh dengan waktu selama ± 15 menit saja.

Perjalanan dari Tarakan ke Malinau dapat juga ditempuh melalui sungai dengan menggunakan *speed boat* yang waktu perjalanannya berkisar ± 3 jam. Bila perjalanan dilakukan dari Kota Samarinda langsung menuju Malinau, maka dapat langsung dilakukan satu kali

“
Suku dayak
agabag sangat
menghomati gajah.
Mereka
memberikan
sebutan dengan
nama ‘nenek’.
Mereka percaya
bahwa gajah
memiliki hubungan
sejarah yang dekat
dengan
masyarakat.
”

penerbangan pesawat, yaitu dengan menggunakan pesawat Susi Air dengan waktu tempuh selama ± 1 jam 40 menit. Setelah sampai di Malinau perjalanan dapat dilanjutkan kembali menuju Kecamatan Sebuku dengan menggunakan kendaraan mobil atau sepeda motor dengan waktu tempuh berkisar $\pm (4-5)$ jam.

Dari informasi yang didapatkan sebelumnya, bahwa Kecamatan Sebuku memiliki luasan sekitar

312.490 Ha, sebagian besar kawasan sudah menjadi areal pengembangan perkebunan kelapa sawit, sebagian menjadi kawasan hutan produksi (HPH/HTI) dan sebagian menjadi kawasan untuk kegiatan pertambangan.

Dari hasil survei yang sudah pernah dilakukan bahwa sebagian besar habitat gajah kini berada pada areal HPH, dan wilayah tersebut sudah berdekatan dengan wilayah Sabah, Malaysia. Wilayah tersebut terdapat banyak sungai-sungai yang menjadi habitat keseharian gajah, seperti sungai Agison, Tampilon dan Sibuda.

Pembukaan hutan menyebabkan pergerakan gajah semakin sempit, sebagai contoh dimana areal jelajah gajah yang dulu masih menjadi kawasan hutan kini sudah menjadi hamparan perkebunan kelapa sawit. Apapun yang terjadi sebagian gajah masih tetap menggunakan jalur tersebut untuk tetap dilaluinya dalam periode waktu tertentu, jalur yang dilalui berubah menjadi tanaman sawit, sedangkan gajah juga menyukai tanaman jenis-jenis *palm* (termasuk sawit) sehingga sawit menjadi makanan kesukaan gajah.

Namun demikian tidak semua gajah keluar dari habitat utamanya yang tersisa, hanya beberapa ekor gajah yang sering melakukan rute perjalanan pada areal perkebunan kelapa sawit dan di wilayah pemukiman warga Sebuku. Penyerangan tanaman sawit dan jenis lainnya pada lahan perusahaan dan lahan masyarakat akibat semakin sempitnya habitat gajah, ada benarnya juga ketersediaan pakan di alam sudah berkurang, sebagian pula meyakini bahwa beberapa ekor gajah yang kerap menyerang tanaman adalah suatu bentuk kemarahan gajah, sebagai peringatan bahwa gajah juga memerlukan tempat untuk hidup.

Terdapat keunikan di sini, masyarakat lokal (suku dayak *agabag*) sangat menghomati gajah,

mereka memberikan sebutan dengan nama “nenek”. Mereka percaya bahwa nenek memiliki hubungan sejarah yang dekat dengan masyarakat dayak *agabag*. Mereka tidak mau mengganggu gajah-gajah yang berkeliaran, dan anehnya walaupun gajah sering keluar masuk pemukiman, gajah tersebut tidak pernah merusak rumah warga ataupun sampai menyerang atau mencederainya.

Tentunya ini bertolak belakang dengan keberadaan gajah yang ada di Sumatera dimana setiap tahunnya terjadi konflik, setiap tahun ada gajah yang mati namun ada juga warga yang mati diserang oleh gajah. Namun demikian akankah budaya masyarakat dayak *agabag* akan tetap bertahan untuk tetap menghormati atau melestarikan gajah, seiring kerapnya serangan gajah pada tanaman milik perusahaan perkebunan kelapa sawit dan tanaman warga Sebuku, semoga saja budaya tersebut tidak luntur.

Menurut Syamsuardi, yang lama berkecimpung dalam konservasi gajah di Riau, bahwa terdapat pengelompokan gajah dalam cara hidup bersosial dengan kawanannya. Yang pertama disebut dengan gajah *group*, yaitu gajah yang hidup berkelompok dengan kawanannya. Dalam satu kelompok jumlahnya tidak menentu, namun rata-rata dalam satu kelompok gajah berkisar 6-7 ekor. Dalam suatu waktu tertentu kelompok-kelompok gajah tersebut dapat melakukan pertemuan bersama sehingga jumlahnya bisa menjadi lebih banyak. Gajah *group* umumnya adalah betina, dalam satu *group* gajah dipimpin oleh gajah betina dewasa, walaupun ada yang jantan itu adalah dari anak-anak mereka dan walaupun ada jantan dewasa biasanya hanya bersifat sementara untuk ikut begabung.

Sedangkan yang kedua disebut dengan gajah *soliter*. Gajah ini merupakan gajah jantan dewasa



yang sering hidup menyendiri, sebagian besar waktunya digunakan untuk menyendiri sambil mencari makanan. Pada masa tertentu gajah ini akan mencari gajah *group* betina, beberapa saat akan masuk dalam kelompok gajah *group* dan mencari gajah betina untuk dikawini. Setelah itu gajah dewasa jantan tersebut kembali ke tempat lain untuk hidup menyendiri.

Kali ini di Sebuku, pengamatan gajah yang dilakukan adalah gajah *soliter*. Gajah ini kerap masuk di wilayah pemukiman dan areal perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dari hasil catatan sebelumnya terdapat 10 desa dari 22 desa di Kecamatan Sebuku yang kerap dilalui oleh gajah *soliter*. Dari pantauan warga, terdapat 1 ekor gajah soliter yang belakangan ini sering melintasi wilayah pemukiman dan areal perkebunan sawit. Namun tidak mudah untuk dapat menjumpai gajah tersebut. Pada masa-masa tertentu gajah bergerak menjauhi wilayah desa dan sering berada pada wilayah hutan. Terkadang walaupun gajah berada pada wilayah pemukiman, diperlukan waktu yang cukup lama untuk menjumpai gajah tersebut dengan menyusuri jejak kaki yang ditinggalkan.

Ini semakin membuat penasaran bagi saya. Rasa cemas terkadang muncul bagaimana jika tidak mendapatkan atau tidak menjumpai gajah tersebut, sedangkan keinginan besarnya adalah bisa menjumpainya. Sesampai di Sebuku, saya dibantu dengan 2 orang warga setempat, kemudian sepakat untuk melakukan pencarian gajah. Berbagai persiapanpun didiskusikan secara bersama. Satu pertanyaan penting saya lontarkan kepada mereka, bagaimana supaya kita lebih efektif bisa menjumpai gajah tersebut. Mereka pun menjelaskan, bahwa kehidupan gajah tidak terlepas dari daerah aliran sungai, setiap hari gajah pasti akan ke sungai untuk minum dan mandi, jejak-jejak gajah biasanya mudah ditemukan di sepanjang aliran sungai yang biasanya mereka kunjungi dalam waktu-waktu tertentu.

Untuk menentukan kemana pergerakan gajah, cukup dengan melihat jejak kaki gajah dan dari kotorannya. Jika terlihat jejak dan kotoran gajah yang masih baru akan memudahkan kita untuk dapat melacak keberadaan gajah tersebut. Pada saat musim hujan sangat membantu untuk mendeteksi jejak



kaki gajah karena pijakan kaki gajah ke tanah akan terlihat lebih jelas kemana arah gajah bergerak, dan yang paling penting adalah melihat kotoran (*feses*) gajah untuk mendeteksi berapa lama gajah bergerak sejak meninggalkan kotoran tersebut. *Feses* gajah mudah dikenali antara yang baru dan yang lama. Bisa dilihat dari warna, tingkat kadar air (kekeringan) *feses* dan kehadiran jenis mikroorganisme pengurai termasuk kehadiran lalat. *Feses* yang baru biasanya berwarna kekuningan kadar airnya masih banyak dan sering dihindangi oleh lalat.

Pencarian pada hari pertama pun dilakukan. Langkah awal yang dilakukan adalah menggali informasi ke masyarakat di beberapa desa yang sering dilalui oleh gajah. Informasi yang digali adalah apakah pernah melihat gajah secara langsung atau hanya sekedar melihat jejak barunya. Dari kegiatan survei awal masih belum didapatkan informasi terbaru mengenai kehadiran gajah, informasi yang diterima adalah ditemukan jejak gajah yang usianya sudah lama.

Dari hasil kunjungan langsung di lapangan memang terdapat jejak gajah tersebut yang usianya sudah

lama, sekitar 2 hari yang lalu mengenai keberadaan gajah tersebut.

Pada hari kedua, pada pagi hari kami mendapat laporan dari seorang warga setempat, tepatnya di desa Semunad yang tak jauh dari aliran sungai Tulid. Warga tersebut menginformasikan bahwa ia melihat jejak kaki gajah yang baru di sungai Tulid yang berdekatan dengan perkebunan kelapa sawit. Kami pun segera berangkat menuju lokasi tersebut dengan menyewa perahu milik warga lalu menyusuri sungai Tulid terlebih dahulu sekitar 15 menit. Sesampai di lokasi kami pun segera mengamati jejak kaki dan kotoran gajah tersebut, dari hasil pengamatan kami menyimpulkan bahwa jejak kaki dan kotoran tersebut adalah masih baru dan kami yakin bahwa keberadaan gajah tersebut masih belum jauh dari jejak pertama yang kami temukan.

Kami terus menyusuri secara perlahan arah jejak kaki gajah tersebut, sepanjang perjalanan lintasan gajah yang dilalui sering ditemukan *feses* gajah, selain itu juga sering ditemukan beberapa jenis tumbuhan yang rusak dimakan oleh gajah seperti pisang hutan, berbagai palm hutan dan jenis-jenis rotan, sering juga dijumpai kayu ukuran

sedang dan besar dirobuhkan oleh gajah untuk membuka jalur agar dia bisa melintas. Rasa takut dan ngeri pun kadang muncul melihat pohon-pohon yang lumayan besar direbahkan oleh gajah, namun dengan berbekal pengetahuan dasar dalam survei gajah di alam dan rasa penasaran yang tinggi untuk melihat langsung keberanian itupun tetap muncul. Setelah berjalan sekitar 20 menit menyusuri jejak gajah kami pun mulai berhenti berjalan, tiba tiba mulai terdengar suara riuh, seperti ada patahan ranting dan cabang pohon secara terus-menerus. Pak Martinus dan Suhindil 2 warga yang menemani saya memberikan isyaratat bahwa kita sudah berada dekat dengan keberadaan gajah.

Rasa senang pun mulai muncul, akhirnya gajah yang kami cari dapat kami temukan, kami pun secara perlahan mulai mendekati pergerakan gajah tersebut. Secara perlahan tapi pasti akhirnya kami sudah berada dekat dengan gajah dan kami sudah bisa melihat langsung gajah tersebut.

Ternyata yang kami amati adalah gajah *soliter*, tentunya gajah jantan dewasa dengan memiliki gading yang cukup panjang. Bagaimana reaksi gajah tersebut melihat kehadiran kami? Ternyata reaksi gajah hanya diam di tempat, kami pun juga berhenti tanpa membereikan reaksi yang berlebihan dan kemudian mengamati perilakunya, mengantisipasi gajah tersebut berbalik arah ke arah kami karena

Foto atas: Jejak kotoran (*feses*) gajah yang ditemukan di lapangan. Dari jejak ini, bisa dideteksi berapa lama gajah bergerak sejak meninggalkan kotoran tersebut.

Foto samping: Areal hamparan perkebunan sawit di Kecamatan Sebuku. Pembukaan hutan menyebabkan pergerakan gajah semakin sempit, dimana dulu kawasan ini merupakan areal jelajah gajah.

Foto samping: Saat-saat ketika akan masuk ke hutan di Kecamatan Sebuku, di area yang diyakini merupakan habitat gajah.



marah. Tak lama kemudian gajah berjalan kembali secara perlahan, merobohkan pohon dan semak untuk dapat dilaluinya terkadang memakan tanaman yang ada disampingnya.

Kami pun secara berulang melakukan pengamatan gajah tersebut. Mengikuti pergerakan gajah ketika berjalan dan berhenti bergerak, juga ketika gajah tersebut berhenti bergerak. Namun demikian, kami tetap menjaga jarak dengan gajah. Jarak pengamatan yang dilakukan tidak boleh terlalu dekat, jarak yang kami lakukan berkisar 20-25 meter dari keberadaan gajah. Kami tetap waspada untuk mengamati dan memastikan gajah tersebut dalam keadaan marah atau tidak dan kami pun tetap selalu memberikan respon yang tidak berlebihan sehingga tidak memancing kemarahan gajah.

Setelah puas mengamati gajah dengan mengikuti pergerakannya, kami pun memutuskan untuk berhenti melakukan pengamatan

dan kembali ke desa. Ini adalah pengalaman pertama yang sangat menakjubkan, betapa tidak, kami telah berhasil menjumpai gajah Kalimantan yang selama ini banyak orang yang membicarakannya.

Dari hasil pengamatan, gajah Kalimantan memang memiliki bentuk fisik yang berbeda dengan kerabatnya gajah yang ada di Sumatera. Gajah ini memang terlihat lebih kecil dan berbadan lebih pendek dan bulat. Dari hasil pengukuran sebelumnya gajah ini tumbuh kurang dari 2,5 meter, sedangkan gajah di Sumatera dan daratan Asia lainnya dapat mencapai petumbuhan hingga mencapai 3 meter. Pada bagian raut wajah terlihat menyerupai bayi, pada bagian telinganya terlihat lebih besar dibandingkan gajah lainnya dan yang unik lagi adalah ekor gajah Kalimantan sangat panjang dan hampir dapat menyentuh tanah.

Jika ingin melakukan pengamatan gajah Kalimantan lebih mudah dibandingkan gajah yang ada

di tempat lain, gajah Kalimantan ditengarai tidak seagresif gajah asia lainnya termasuk gajah yang ada di Sumatera, sehingga pengamatan gajah Kalimantan lebih mudah dilakukan. Namun demikian resiko tetap ada jika pengamatan dilakukukan dengan tidak berhati-hati, terlebih pengamatan yang dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan yang paling penting lagi adalah kita harus bisa mengetahui perilaku atau karakter dari gajah. Dengan demikian jika anda ingin melakukan pengamatan gajah Kalimantan paling tidak harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, semoga anda berhasil.

Foto samping: Gajah Kalimantan yang berhasil ditemukan di Kecamatan Sebuk. Ukuran tubuh gajah ini lebih kecil, pendek dan bulat dibandingkan gajah Sumatera. Yang unik, ekor gajah Kalimantan sangat panjang dan hampir dapat menyentuh tanah.

Berita dari rangkaian acara

Irau 2010 Kabupaten Malinau



Geliat Muda Mudi Malinau & Harmoni Vokal yang Hijau



“Malam itu Deby Kristiani tampak tertegun. Mulutnya tersenyum ketika namanya diucapkan pembawa acara. Seperti senyum dari keenam personil Jamaican Café di atas panggung, yang tampil kompak dengan gambar panda di dada.”

Tidak hanya Deby, senyum pun diekspresikan oleh Yehuda Agus Santoso. Anak muda berkacamata ini tampak riang tapi malu ketika ketika dinyatakan sebagai pemenang. Ya, Deby dan Yehuda adalah pemenang dari ajang pemilihan Duta Lingkungan dan Duta Konservasi Kabupaten Malinau 2010. Kedua anak muda ini telah berhasil menyisihkan dua belas finalis lainnya pada acara grand final malam itu. Debby adalah siswa SMAN 4 Malinau,

dan Yehuda adalah siswa SMAN 1 Malinau.

Memang, malam itu kedua muda-mudi Malinau ini telah memukau ketujuh dewan juri sebagai tim penilai. Mereka dengan pasti menjawab semua rentetan pertanyaan dari para juri, walau kadang sesekali tampak grogi. Tapi itu wajar, karena mereka berdiri di depan ribuan masyarakat Malinau yang ikut menyaksikan ajang pemilihan ini. Tak jarang sorak dan



“Mereka menyebut musik ini sebagai jenis musik yang ramah lingkungan, karena untuk memainkannya tidak membutuhkan banyak energi listrik.”

sorai harus mereka terima yang tampak seperti ujian lainnya yang harus mereka lewati.

Tim juri melibatkan beberapa instansi terkait. Yaitu dari Dinas Pariwisata dan Budaya, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Balai Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM), FoMMA, dan WWF Indonesia Kalimantan Timur, yang sebagian besar diwakili oleh pimpinannya masing-masing. Selain itu, acara ini terasa semakin istimewa karena Wakil Bupati, H. Datuk Mohammad Nasir SH MAP berkenan hadir dan menjadi juri khusus. Acara juga dihadiri Sekretaris Bupati beserta jajarannya, DPRD, serta Kapolres dan Dandim Kabupaten Malinau.

Untuk juara kedua dan ketiga untuk Duta Lingkungan diraih oleh Olipianti dan Susi Jamria. Keduanya siswi SMAN 1 Malinau. Sedangkan untuk Duta Konservasi, juara kedua dan ketiga ditempati oleh Hengki Santoso dan Jaffrai Andreas. Uniknya, Jaffrai adalah guru dari Yehuda di SMAN 1 Malinau. Kepada para pemenang panitia memberikan trofi, piagam penghargaan dan uang pembinaan.

Keempat belas finalis adalah mereka yang telah lolos seleksi dan mengikuti beberapa pembekalan materi selama lima hari, dimulai sejak tanggal 25 sampai dengan 30 Oktober 2010. Di malam puncak *grand final*, mereka telah saling unjuk bakat, kemampuan, dan wawasan di depan

para juri dan masyarakat Malinau demi mendapatkan predikat duta lingkungan dan konservasi Kabupaten Malinau 2010.

Acara yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten Malinau 2010 ini, diselenggarakan di panggung utama area pameran Irau 2010. Acara ini terselenggara atas kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dan WWF Indonesia

Foto atas: Jamaican Café, ketika menghibur ribuan masyarakat Malinau yang hadir pada malam *grand final* pemilihan duta lingkungan dan konservasi. Di jeda tiap lagu, mereka selalu menyampaikan ajakan dan pesan-pesan konservasi. (Foto: WWF Indonesia/Ery Bukhorie)

Foto samping: Deby Kristiani (keenam dari kanan) dan Yehuda (ketiga dari kiri), ketika berfoto bersama dengan finalis lainnya sesaat setelah penyerahan trofi dan piagam. (Foto: WWF Indonesia/Ery Bukhorie)

Sesuai dengan predikat Kabupaten Malinau sebagai kabupaten konservasi, pemenang dari kontes pemilihan ini, kelak akan menjadi ikon dalam kampanye lingkungan serta promosi wisata Malinau yang berada di Jantung Borneo (HoB), yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Malinau, Balai Taman Nasional Kayan Mentarang serta WWF Indonesia.

Dody Rukman, *Project Leader* WWF Indonesia – Kalimantan Timur mengatakan bahwa, Pemilihan Duta Lingkungan dan Duta Konservasi Kabupaten Malinau adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya konservasi sumberdaya alam di Kabupaten Malinau yang merupakan Kabupaten Konservasi, khususnya oleh generasi muda. Kegiatan ini bertujuan untuk memilih pasangan muda-mudi yang dinilai memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pelestarian sumberdaya alam.

Rangkaian kegiatan dalam acara ini telah dimulai sejak tanggal 21 Oktober 2010, dengan tahapan pertama berupa penjaringan dengan melakukan wawancara dan tes tertulis kepada para peserta. Hal ini dilakukan untuk menentukan finalis yang berhak mengikuti acara *grand final*. Para finalis terpilih kemudian dibekali dengan beberapa materi terkait pengetahuan dan pandangan tentang lingkungan, konservasi, juga dilatih kemampuan dalam hal *outward performance* untuk pengembangan kapasitas diri di masyarakat, sesuai dengan posisi mereka nanti sebagai duta lingkungan dan konservasi setelah terpilih.

Penampilan atraktif Jamaican Cafe

Upaya kampanye penyadartahuan tentang pentingnya TNKM ini, juga melibatkan artis supporter kehormatan WWF Indonesia, Jamaican Cafe, untuk



turut serta menyebarkan pesan-pesan konservasi kepada masyarakat Malinau yang memenuhi lapangan utama acara Irau 2010 malam itu. Jamaican Cafe merupakan grup vokal *acapella* yang punya perhatian terhadap permasalahan lingkungan hidup di tanah air. Hal itu dicurahkan dalam beberapa lagu bertemakan alam dan lingkungan yang sengaja diciptakan di album terbaru mereka yang saat ini sedang dalam proses penggarapan.

Decak kagum, dan juga heran, terlihat dari wajah para penonton saat itu. Mereka bingung ketika mendengar suara *drum*, gitar, maupun bas, tetapi tidak melihat satu pun alat musik tersebut berada di atas panggung. Ternyata ragam suara tersebut berasal dari mulut para personil Jamaican Cafe, hasil kepiawaian mereka dalam mengatur napas dan itonasi suara. Spontan riuh tepuk tangan pun terdengar nyaring sebagai bentuk apresiasi para penonton.

Di setiap jeda lagu yang ditampilkan, grup vokal *acapella* yang digawangi oleh Anton, Michael, Hekko, Bayu, Iko, dan Jimmy ini, selalu mengajak penonton untuk sama-sama peduli terhadap

lingkungan. Yang menarik, mereka mengemas pesan lingkungan tersebut dalam bahasa yang ringan dan mudah dimengerti. Seperti ketika menerangkan tentang mengapa musik *acapella* yang mereka pilih. Mereka menyebut musik ini sebagai jenis musik yang ramah lingkungan, karena untuk memainkannya tidak membutuhkan banyak energi listrik.

Keesokan harinya, para personil Jamaican Café bersama pasangan duta lingkungan dan konservasi terpilih melakukan *field trip* ke Giran Kayan, ditemani beberapa staf WWF Indonesia. Di lokasi, rombongan mendapatkan penjelasan dari perwakilan masyarakat adat, tentang nilai-nilai kearifan lokal yang ada di di TNKM.(EB)

Foto atas: Personel Jamaican Café, Duta Konservasi & Lingkungan Kab. Malinau, masyarakat adat Mentarang Hulu dan staf WWF Indonesia sedang berdiskusi mengenai kearifan lokal dan dukungan masyarakat adat terhadap keberadaan TNKM sembari menikmati keindahan alam Mentarang Hulu.(Foto: WWF Indonesia/Ery Bukhorie)

Dari Acara Pameran Pembangunan Irau 2010 Kabupaten Malinau

Stand WWF Indonesia Juara 1



Malinau - WWF Indonesia Proyek Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) turut berpartisipasi dalam acara pameran pembangunan dalam rangka perayaan hari ulang tahun Kabupaten Malinau 2010, dan terpilih sebagai juara 1 untuk kategori organisasi sosial maupun masyarakat/LSM. Acara yang terangkum dalam Irau 2010 ini, merupakan acara yang rutin diselenggarakan oleh pemerinah daerah Kabupaten Malinau setiap dua tahun sekali. Acara ini, merupakan acara ke-6 sejak dibentuknya Kabupaten Malinau, diselenggarakan selama dua belas hari, dari tanggal 26 Oktober sampai dengan 7 Nopember 2010.

Di acara pameran, stand WWF Indonesia terpilih sebagai juara 1 untuk kategori organisasi sosial maupun masyarakat/LSM. Acara yang terangkum dalam Irau 2010 ini, merupakan acara yang rutin diselenggarakan oleh pemerinah daerah Kabupaten Malinau setiap dua tahun sekali. Acara ini, merupakan acara ke-6 sejak dibentuknya Kabupaten Malinau, diselenggarakan selama dua belas hari, dari tanggal 26 Oktober sampai dengan 7 Nopember 2010.

Setiap harinya stand WWF Indonesia selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai kalangan, dengan beragam pertanyaan yang mereka tanyakan. Ketertarikan mereka dipicu oleh gambar peta *buffer zone* berukuran raksasa, beserta informasi desa-desa yang berada di dalamnya, dan terpampang di satu sisi stand pameran, serta kumpulan foto yang disusun dengan kompisisi artistik dan ditempel pada sisi lainnya. Dari ketertarikan itu lantas keluar beragam pertanyaan dari masyarakat terkait informasi dan gambar yang mereka lihat dari kedua visualisasi tadi.

Stand WWF Indonesia dalam acara Irau 2010, mengedepankan tema “Pengembangan daerah penyangga TNKM dalam rangka mendukung implemantasi Kabupaten Konservasi di Bumi Intimung.” Pengambilan tema ini didasarkan atas kesesuaian dengan tema utama pameran Irau 2010.

Adapun materi yang dipamerkan berupa beberapa informasi terkait pengembangan daerah penyangga TNKM dan informasi lainnya dalam pengelolaan kolaboratif TNKM. Informasi-informasi tersebut disajikan dalam bentuk visualisasi *banner*, spanduk, poster, *leaflet*, *sticker*, foto, buku, laporan-laporan kegiatan serta

informasi interaktif yang disampaikan langsung oleh staf WWF.

Tentang Irau 2010

Pesta budaya Irau ke-6 yang dirangkai lewat pameran pembangunan HUT ke-11 Kabupaten Malinau merupakan salah satu upaya untuk menggali khasanah budaya yang ada di Kabupaten Malinau. Bagi pemerintah dan masyarakat, perhelatan Irau kali ini memiliki kadar keistimewaan yang lebih. Sebab, bertepatan dengan genapnya 11 tahun usia Bumi Intimung yang dikenal dunia sebagai kabupaten konservasi. Gayung bersambut pula dengan genapnya dua episode perjuangan pemerintah daerah membangun Malinau melalui Gerakan Pembangunan Desa Mandiri (Gerbang Dema) yang diprakarsai oleh Bupati Marthin Billa.

Adapun tema pameran pembangunan mengarah kepada penanaman rasa cinta melalui hasil-hasil pembangunan dengan perwujudan melalui Gerbang Dema, cinta konservasi dan lingkungan, cinta damai, aman dan sejahtera, serta cinta produk unggulan sendiri. Pameran ini diikuti oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kelompok kecamatan, organisasi sosial maupun masyarakat, lembaga-lembaga adat, serta dunia usaha yang ada di Kabupaten Malinau. Ada penilaian oleh panitia terhadap setiap stand pameran menurut kelompoknya masing-masing. Kriteria penilaian didasarkan atas beberapa aspek seperti; kesesuaian materi yang dipamerkan dengan tema acara, kejelasan dalam memberikan informasi, keunikan dan kreatififan penampilan stand, keramahtamahan, serta keramaian pengunjung. (EB)

Foto atas: Suasana ketika stand WWF Indonesia ramai dikunjungi oleh rombongan anak sekolah. Tampak (membelakangi) staf WWF Indonesia sibuk memberikan penjelasan. (Foto: WWF Indonesia/Ery Bukhorie)

Jalur Ekowisata Terbaru di TNKM

Trek Banteng



Teks: Cristina Eghenter
& Dave Forney
Foto: Dave Forney & Paul

Kawasan TNKM memang kaya akan atraksi dan obyek menarik untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata. Sesuai aspirasi dan prinsip pemberdayaan masyarakat, maka masyarakat khususnya di Krayan, Bahau Hulu dan Pujungan sudah mulai mengembangkan ekowisata di tempat masing-masing. Panitia ekowisata (Bio Sahe, BPTU, Ulung

Mung Hulu Pujungan) dan LSM lokal (Formadat, LSM Tana Tam Krayan Hulu) sudah menyusun beberapa paket lokal untuk memperkenalkan ciri khas daerah seperti alam, budaya, dan sejarah, dan juga sudah merintis beberapa jalur ekowisata untuk alternatif treking petualangan di hutan tropis. Khususnya di TNKM, satu hal yang menjadi sangat menarik bagi

wisatawan adalah bahwa daerah kawasan konservasi ini, adalah pertama kawasan masyarakat adat yang secara turun menurun dikelola secara lestari oleh masyarakat adat sesuai tradisi dan nilai adatnya. Hal ini berarti bahwa sebagian besar jalur trekking hutan di kawasan TNKM adalah juga jalur “sejarah” yaitu jalan setapak yang sejak dulu dipakai oleh masyarakat untuk berkunjung ke daerah lain dengan tujuan perdagangan, acara keluarga, migrasi. Di kawasan ini banyak terdapat juga lokasi *lepu'un* atau bekas kampung. Berarti ada nilai plus yang dimiliki sebuah pengalaman trekking di kawasan TNKM.

Salah satu jalur ekowisata yang menarik baik dari segi alam maupun sejarah adalah jalur yang baru dirintis dan dibuka secara bersama oleh panitia ekowisata Bio Sahe Apau Ping dan LSM Tana Tam Krayan Hulu: Trek Banteng dari Long Tua, hulu sungai Bahau, ke Long Layu/Pa'Upan, Krayan Selatan. Trek ini dinamakan 'banteng' karena melintasi areal padang rumput atau *grasslands* yang menjadi salah satu habitat utama banteng di Borneo. Trek Banteng makan waktu sekitar 6-7 hari, tergantung kesiapan fisik wisatawan, harga dan paket lokal sudah diatur oleh masyarakat.

Sebuah Jurnal Perjalanan

Pada bulan Mei 2010 yang lalu, Pak Paul dan Pak Dave, pilot senior MAF, sempat menelusuri jalur ekowisata 'trek banteng' bersama pemandu dari masyarakat lokal. Memang, selain melayani dengan setia masyarakat perbatasan sebagai pilot MAF yang tidak kenal lelah, mereka juga adalah petualang sejati yang ingin mengenal alam dan budaya di daerah di mana mereka bersama keluarganya bertugas.

Berikut beberapa catatan harian oleh Pak Dave Forney selama perjalanan dari Bahau Hulu ke Krayan Hulu.



“ Kami berjalan di hutan sangat tua, mungkin yang paling asli kami lewati. Ada pohon sangat besar, merasa seperti dalam film Jurassic Park jaman dinosaurus. ”

(Hari pertama)

Bermalam di pondok ekowisata yang dibangun oleh Panitia Bio Sahe' dan masyarakat Apau Ping, tempat sederhana namun sangat menyenangkan. Pondok ini terletak tidak jauh dari padang rumput habitat banteng. Pada sore pertama

kami sempat melihat beberapa banteng makan rumput di lereng bukit, burung-burung yang indah terbang di atas kawasan, dan ada juga monyet dan payau yang sempat memperlihatkan diri kepada rombongan kami. Saat matahari terbenang dan angin meniup dengan lembut, memang kesan luar biasa kami menikmatinya di kawasan padang rumput, maunya bisa tinggal lebih lama disana.

(Hari kedua)

Luar biasa wildlife watching sepanjang jalan pada hari ini, ada monyet, burung enggang, rombongan babi hutan (dan satu menjadi korban untuk makan malam kami), dan tanda-tanda beruang banyak di sekeliling pondok kami.

(Hari ketiga)

Pada hari ke-3 ini, kami sampai di sungai Mangau. Sebuah sungai yang indah sekali, kami merasa seperti memandang sebuah lukisan hutan tropis yang sempurna. Di daerah ini ada banyak pohon buah dan tanaman kopi yang sudah tua. Ini sebagai tanda bahwa dulu terdapat beberapa pemukiman orang Sa'ban yang sudah lama ditinggal.

Di dekat daerah pondok, kami menemukan beberapa jamur yang sangat menarik, karena pada malam hari bercahaya dan berwarna hijau jika terkena sorotan cahaya senter.

(Hari keempat)

Banyak lagi hewan yang kami temukan pada hari ini, mungkin mereka berada di sana karena kebetulan musim buah. Ada

Foto samping: Dave dan Paul foto bersama dengan para pemandu di tengah perjalanan banteng trek.

Foto atas: Dave Forney berpose di depan sebuah pohon besar yang dipenuhi lumut, di perjalanan menuju Krayan.



beberapa rombongan owa, payau, babi hutan, burung enggang, dan monyet. Perjalanan hari ini juga banyak naik turun bukit namun tidak ada gunung yang terlalu terjal.

(Hari kelima)

Kami berjalan di hutan sangat tua, mungkin yang paling asli kami lewati. Ada pohon sangat besar, merasa seperti dalam film Jurassic Park jaman dinosaurus.

Banyak sungai kecil yang berbatuan mengalir dari lereng gunung. Ada satu daerah dengan tebing batu yang tinggi, di sini dulu sering digunakan tempat berlindung dan bermalam orang-orang yang sedang dalam perjalanan ke Malaysia.

Dari sini kami naik gunung

terus menuju perbatasan antara wilayah Hulu Bahau dan Krayan Hulu. Semakin tinggi kami naik, hutan juga mulai berbeda dengan pohon-pohon diselimuti lumut yang tebal. Kabut dan rasa dingin juga sering menyertai kami dalam perjalanan di hutan pegunungan ini, namun kami merasa bersyukur sekali atas pengalaman dan perjalanan ini.

(hari keenam)

Ini hari kami sampai di sungai Bulu, Krayan, dan kami terus turun gunung melalui daerah berbatuan ke tempat penjemputan kami oleh masyarakat. Kami janji dijemput oleh masyarakat dari Pa Upan, menggunakan perahu ketinting.

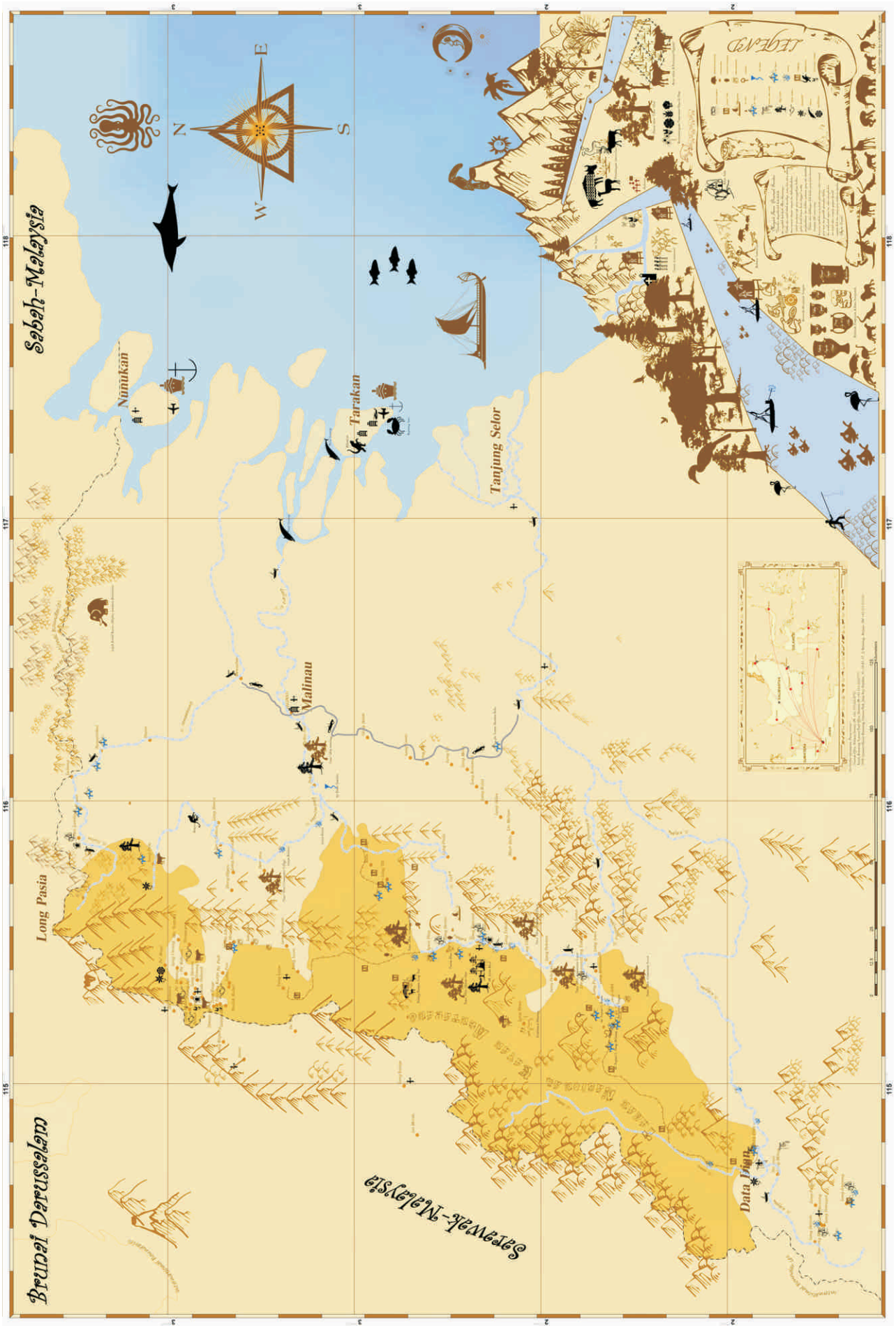
Karena hujan dan banjir, kami baru bisa bertemu dengan

rombongan dari Pa Upan pada sore hari, dan kami baru bisa ke desa Pa Upan pada hari berikutnya, kemudian terbang ke rumah dan keluarga kami di Tarakan.

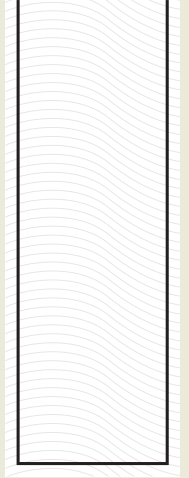
Tentu kami sangat senang bisa melintasi trek banteng ini, melewati jantung Borneo. Kami pun merasa aman dalam perjalanan, karena dibantu oleh masyarakat dan yakin akan sampai ke tempat tujuan. Kami tidak akan pernah melupakan pengalaman ini, dan kami harap akan banyak wisatawan lainnya yang punya kesempatan untuk mengikuti jejak kami.

Foto atas: Padang Rumput di Long Tua, sebelah hulu Apau Ping. Ini merupakan ekosistem (habitat) unik untuk satu dari populasi banteng liar (*Bos javanicus*) yang tersisa di Borneo.

Peta Tujuan Wisata di Kawasan TN Kayan Mentarang dan Sekitarnya



Ilustrasi peta: WWF Indonesia/M. Irfansyah Lubis



Mengapa kita di sini

Untuk menghentikan degradasi lingkungan alam di planet ini dan untuk membangun masa depan dimana manusia hidup selaras dengan alam.